

DINAMIKA KREDIT SEKTOR PERTANIAN DI BRI CABANG SUTOYO MALANG TAHUN 2012-2013

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Yeni Arista
105020100111072**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Dinamika Kredit Sektor Pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013"

Yang disusun oleh :

Nama : Yeni Arista
NIM : 105020100111072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Perbankan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **11 Juni 2014** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.
NIP. 19700920 199512 1 001
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Ghozali Maski, SE., MS.
NIP. 19580927 198601 1 002
(Dosen Penguji I)
3. Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., PhD.
NIP. 19650311 198903 2 001
(Dosen Penguji II)



Malang, 20 Juli 2014

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Dinamika Kredit Sektor Pertanian Di BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013

Yang disusun oleh :

Nama : Yeni Arista
NIM : 105020100111072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Perbankan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 23 Mei 2014

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



**Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,**

**Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001**

**Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.
NIP. 19700920 199512 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Yeni Arista
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Januari 1992
NIM : 105020100111072
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Perbankan
Alamat : Jln. Menur No. 79 Curahnongko-Tempurejo-Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Dinamika Kredit Sektor Pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2014

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.
NIP. 19700920 199512 1 001



buat pernyataan,

Yeni Arista
NIM. 105020100111072



Mengetahui,

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

Curriculum Vitae

Nama : Yeni Arista
 TTL : Jember, 13 Januari 1992
 Alamat : Jln Terusan Dieng gang 2, Malang
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Fakultas/Universitas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Hobi : Menulis, *travelling*, *research*
 Skill : Menulis, *public speaking*, negosiasi, manajemen tim.
 Organisasi yang pernah diikuti: CIES FEB UB, UNITAS RKIM UB, BEM FEB UB,
 HMJ IE FEB UB

Daftar Riwayat Pendidikan

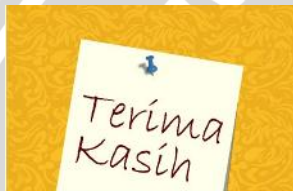
TK Dharma Wanita IV Curahnongko	Lulus Tahun 1999
SDN Curahnongko VII	Lulus Tahun 2004
SMP Negeri I Ambulu	Lulus Tahun 2007
SMA Negeri Ambulu	Lulus Tahun 2010
Universitas Brawijaya Malang	Lulus Tahun 2014

UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah
(praise to God)

Terimakasih untuk kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, dukungan materi dan non materi serta perhatian sebagai teman curhat terbaik. Semoga Allah selalu menjagamu dalam kebaikan Ibu, Bapak. Love You Forever.



1. Seluruh Jajaran birokrasi IE FEB UB, Kajor Bpk Dwi Budi, Sekjur Bpk Putu dan para staff jurusan.
2. Dosen Pembimbing Bpk Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.
3. Ibu Tyas C yang sudah membantu memberikan brainstorming dan wawasan.

Mba Silvi Asna dan Mas Pras yang membantu memberikan informasi terkait kredit BRI



Terimakasih telah mengajarkan banyak hal. Arti sebuah perjuangan, persaudaraan, hidup bermasyarakat, dan prestasi.

Saudara seperjuangan YUMNA yang selalu memotivasi dan setia hadir disetiap keluh kesahku. Love you forever Zihan, Dina, Iis, dan Khusnul. Serta dek Ani yang sudah sering nganter penelitian, juga Hesthi yang selalu siap berkorban.

Tak lupa pula terimakasihku untukmu, adikku Ardiyan yang sudah banyak membantu. Juga rekan kerjaku PH CIES 2013, Afif, Shinta, Nisak. Dan Eko, thanks pdfnya.

MOTTO

QS Luqman: 27

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

“Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa, lagi Maha Bijaksana.”

QS Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Sang Penguasa Kehidupan Allah SWT atas segala petunjukNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Kedua kalinya sholawat serta salam saya tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan tokoh inspirasi yang mengajarkan ilmu dalam Al-Qur'an sehingga setiap orang yang berfikir tidak akan tersesat untuk hidup di dunia ini.

Pada dasarnya skripsi ini merupakan salah satu usaha saya untuk mengejar ilmu yang nantinya akan menjadi bekal di masa depan. Selain itu, mudah-mudahan tulisan sederhana ini dapat memberi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan. Tulisan ini sebagian besar merupakan hasil dari proses belajar yang saya ikuti di bangku perkuliahan, untuk itulah sudah sepantasnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para pimpinan di Universitas mulai dari Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ketua Jurusan beserta Wakil dan staf.
2. Para Bapak/Ibu dosen, terutama dari jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Teman-teman di kelas dan di organisasi kemahasiswaan khususnya CIES FEB UB.
4. Serta yang paling utama teruntuk kedua orang tua yang selalu mendo'akan untuk semua kemudahan dan kelancaran penyelesain studi.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, saya sadar begitu banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun isinya. Untuk itulah besar harapan dari saya atas kepedulian pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAKSI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Konteks Penelitian	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
2.1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Jenis-jenis Kreditnya	10
2.2. Penelitian Terdahulu	13
2.3. Program Kredit Pertanian	15
2.3.1. Jenis-jenis Kredit Pertanian BRI	18
2.3.2. Skema Kredit Pertanian yang Diprogramkan BRI	20
2.3.3. Mekanisme Kredit Pertanian	26
2.4. Dinamika Pengembalian Kredit Pertanian	29
2.5. Jenis-jenis Dinamika Kredit Bermasalah	33
2.6. Pengaruh Kredit Bermasalah Bidang Pertanian bagi Perbankan	34
2.7. Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Kredit Sektor Pertanian	36
2.8. Kerangka Pikir	42
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3. Data dan Sumber Data	45
3.4. Metode Pengumpulan Data	46
3.5. Populasi dan Sampel	47
3.6. Metode Analisis Data	48
3.7. Uji Validitas Data	50

BAB IV PEMBAHASAN 52

- 4.1. Dinamika Pengembalian Kredit Pertanian, Kolektibilitas, dan Faktor-Faktor Penyebab Kredit Pertanian Terjerat Kredit Bermasalah di BRI Cabang Sutoyo Malang 61
- 4.2. Pengaruh Adanya Kredit Pertanian bagi Pembangunan Pertanian di Bawah Naungan BRI Cabang Sutoyo Malang 81
- 4.3. Informasi Tambahan (Kemampuan Akselerasi BRI)..... 93

BAB VI PENUTUP 96

- 6.1. Kesimpulan 96
- 6.2. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003-2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha.....	2
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Berhubungan dengan Kredit Pertanian dan Kredit Bermasalah	14
Tabel 2.3 Resiko Kredit Pertanian	32
Tabel 4.4 Perbedaan Syarat dan Fasilitas Kredit Pertanian Berdasarkan Jenis Programnya di BRI Cabang Sutoyo Malang	53
Tabel 4.5 Plafond KKPE, KUR, dan Ritel Pertanian Periode 2012-2013 di BRI Cabang Sutoyo Malang.....	54
Tabel 4.6 Nilai NPL KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013..	64
Tabel 4.7 Laporan Angsuran KKPE Bermasalah	65
Tabel 4.8 Laporan Angsuran Kredit Ritel Pertanian	71
Tabel 4.9 Laporan Angsuran Kredit Pertanian KUR Tahun 2012	74
Tabel 4.10 Laporan Angsuran Kredit Pertanian KUR Tahun 2013	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) di Malang	3
Gambar 1.2 Ilustrasi Pembayaran Angsuran Kredit Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang	5
Gambar 2.3 <i>Flowchart</i> Kerangka Pikir Penelitian	42
Gambar 4.4 Grafik KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013 ..	55
Gambar 4.5 Grafik Nasabah KKPE Periode 2012-2013.....	55
Gambar 4.6 Grafik KUR Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013.....	56
Gambar 4.7 Grafik Nasabah KUR Pertanian Periode 2012-2013.....	57
Gambar 4.8 Grafik Ritel Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013.....	57
Gambar 4.9 Grafik Nasabah Ritel Pertanian Periode 2012-2013.....	58
Gambar 4.10 Grafik Pembayaran Angsuran KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013	63
Gambar 4.11 Kurva Posisi KUR, KKPE, dan Ritel Berdasarkan Kondisi Bisnis Debitur dan Skala Usaha.....	72
Gambar 4.12 Bagan Resiko Kredit	80
Gambar 4.13 Bagan Analisis Makro Dampak Kredit Pertanian Bagi Pengambilan Keputusan Petani, Bank, dan Pemerintah	84

Gambar 4.14 Bagan Dampak Kredit Pertanian Bagi Pembangunan

Pertanian Secara Ideal..... 91



ABSTRAKSI

Arista, Yeni. 2014. *Dinamika Pengembalian Kredit Sektor Pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Brawijaya. Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.*

Membahas tentang pertanian berarti sama halnya dengan membahas urusan pangan sebagai kebutuhan utama kelangsungan hidup mayoritas masyarakat Indonesia termasuk warga Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode *interview* yaitu mewawancarai narasumber dari pihak BRI Cabang Sutoyo Malang yang menjadi penanggungjawab program untuk kredit sektor pertanian.

Hasil penelitian mengenai dinamika kredit sektor pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang yang didasarkan pada laporan kredit periode 2012-2013 dan beberapa sumber terkait menunjukkan bahwa dalam dinamika kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang pada tahun 2012-2013 tentang ketiga program kredit untuk sektor pertanian yaitu KKPE, Ritel Pertanian, dan KUR memiliki tingkat kolektibilitas yang sampai pada level kolektibilitas kredit bermasalah bahkan sampai tahap macet kecuali Ritel Pertanian. Akan tetapi karena nilai NPL ketiganya masih tetap terjaga (kurang dari 5%, kecuali untuk satu NPL bulan Desember 2013 pada program KUR pertanian yaitu sebesar 24,69%) sehingga walaupun demikian nilai kolektibilitas tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional bank. Sedangkan mengenai pengaruh kredit pertanian terhadap pembangunan pertanian dalam naungan BRI Cabang Sutoyo masih berada pada titik mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan pertanian akan tetapi masih belum optimal.

Kata Kunci: Kolektibilitas Kredit, Metode Interview, Pengaruh Kredit Pertanian bagi Pembangunan Pertanian, Pengembalian Kredit.

ABSTRACT

Arista, Yeni. 2014. *Dynamic Restoration Credit of Agriculture Sector In BRI Malang Sutoyo Period 2012-2013. Minor Thesis, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Arif Hoetoro, SE.,MT.,PhD.*

Discussion about agricultural is means discussing about the food as the primary needs for the majority of Indonesian people, including residents of Malang. This study uses a qualitative approach to primary data. This research method is done with interviewed sources from the BRI branch Sutoyo Malang as the custodians of the credit program for agriculture.

The result confirm that in the dynamic of agricultural credit return in BRI Branch Sutoyo Malang at 2012-2013 which consist of three programs of credits such as KKPE, Agricultural retail and SME Credit has low collectability and reach the non-performing loan level, except the agricultural retail. But all of NPL level still awake (less than 5%, except for one NPL in December 2013 on agricultural KUR program taker 24.69%) despite of this colectibility level, the operational activities of the bank are remaining stable. Meanwhile, the influence of agricultural credit with the development of agriculture under the supervision of BRI Branch Sutoyo Malang is still on the level of able to foster the development of agriculture but the function is not significantly optimum.

Keywords: Collectible Credit, Credit Returns, The influence of Agricultural Credit for Agricultural Development, Interview Methods.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Membahas tentang pertanian berarti sama halnya dengan membahas urusan pangan sebagai kebutuhan utama kelangsungan hidup mayoritas masyarakat Indonesia termasuk warga Kota Malang. Dengan melihat hasil sub sektor pertanian sebagai pemasok utama kebutuhan hidup, maka sektor pertanian menjadi sangat strategis kedudukannya dari pada sub sektor lainnya. Maka strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian sudah selayaknya menjadi lokomotif pembangunan. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Malang sebanyak 328.031 unit kepemilikan lahan yang dikelola oleh rumah tangga, 46 unit dikelola oleh usaha terkait pertanian berbadan hukum dan sebanyak 4 unit dikelola oleh selain rumah tangga dan usaha terkait berbadan hukum (BPS Malang, 2013).

Pada data di bawah ini akan ditunjukkan bahwa masih ada cukup RTP yang dapat memperbaiki pangan lokal yaitu lebih dari 3000 RTP. Akan tetapi fakta sekarang seperti yang diungkapkan Birokrasi Dinas Pertanian Kota Malang, Ninik Suryantini, mengakui, pada tahun 2007 lalu, luas lahan pertanian mencapai 1.550 hektar, tahun 2009 menyusut menjadi 1.400 hektar, tahun 2012 tinggal 1.300 hektare. Kini luas lahan pertanian di Kota Malang tinggal 1.282 hektar. Seharusnya untuk wilayah Kota Malang luas lahan tersebut minimal 2.000 hektar. Praduga sementara peneliti atas pengurangan lahan pertanian ini disebabkan karena kurang menjanjikannya sektor usaha pertanian untuk memberikan pendapatan yang lebih bagi masyarakat Malang. Berikut rincian data usaha pertanian yang masih tersisa di Kabupaten Malang:

Tabel 1.1: Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha

No	Kecamatan	2003 (I) (RTP)	2003 (II) (RTP)	2013 (Usaha terkait)	2013 (Lainnya)	Pertumbuhan 2003-2013 (RTP) Absolut	Pertumbuhan 2003-2013 (RTP) persen
1	Donomulyo	16.352	14.703	-	-	-1.649	-10,08
2	Kalipare	13.039	13.705	-	-	666	5,11
3	Pagak	10.694	9.289	-	-	-1405	-13,14
4	Bantur	16.587	14.902	-	-	-1685	-10,16
5	Gedangan	12.965	13.169	4	-	204	1,57
6	Sumbermanjing	21.087	19.487	6	-	-1600	-7,59
7	Dampit	22.238	20.462	1	-	-1776	-7,99
8	Tirtoyudo	14.265	14.248	5	-	-17	-0,12
9	Ampelgading	12.368	12.478	1	-	110	0,89
10	Poncokusumo	18.126	16.594	-	-	-1532	-8,45
11	Wajak	14.774	14.026	1	-	-748	-5,06
12	Turen	13.808	10.529	2	-	-3279	-23,75
13	Bululawang	6.460	4.928	3	-	-1532	-23,72
14	Gondanglegi	10.299	7.422	2	2	-2877	-27,93
15	Pagelaran	11.326	9.168	-	-	-2158	-19,05
16	Kepanjen	7.403	5.534	2	2	-1869	-25,25
17	Sumberpucung	10.295	5.726	-	-	-4569	-44,38
19	Kromengan	8.274	6.004	-	-	-2270	-27,44
19	Ngajum	9.905	8.342	1	-	-1563	-15,78
20	Wonosari	9.576	7.012	1	-	-2564	-26,78
21	Wagir	6.171	5.643	1	-	-528	-8,56
22	Pakisaji	5.033	3.690	1	-	-1343	-26,68
23	Tajinan	8.645	6.238	-	-	-2407	-27,84
24	Tumpang	13.825	9.632	-	-	-4193	-30,33
25	Pakis	13.531	7.292	-	-	-6239	-46,11
26	Jabung	12.413	10.084	-	-	-2329	-18,76
27	Lawang	8.381	6.830	3	-	-1551	-18,51
28	Singosari	13.296	11.029	5	-	-2267	-17,05
29	Karangploso	6.122	6.034	2	-	-88	-1,44
30	Dau	8.065	6.288	-	-	-1777	-22,03
31	Pujon	12.693	11.940	3	-	-753	-5,93
32	Ngantang	12.325	10.370	2	-	-1955	-15,86
33	Kasembon	6.549	5.233	-	-	-1316	-20,09
-	Kab. Malang	386.890	328.031	46	4	-58.859	-15,21

Catatan: Untuk tahun 2003 tidak dilakukan pendataan terhadap non-rumah tangga usaha pertanian.

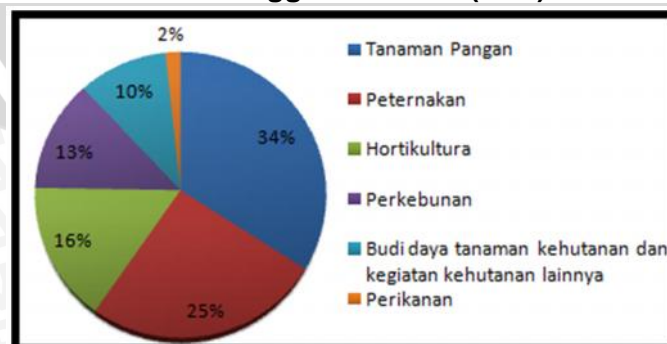
Keterangan: RTP (Rumah Tangga Pertanian), Usaha terkait (Usaha terkait Pertanian Berbadan Hukum), Lainnya (Usaha terkait Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian).

Sumber: Hasil Survey Badan Pusat Statistik Malang, 2013

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada cukup RTP yang dapat memperbaiki pangan lokal yaitu lebih dari 3000 RTP. Akan tetapi fakta bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan yang dinyatakan Suryantini (2007) lahan pertanian tidak lebih dari 2000 hektar menjadi bukti bahwa sudah banyak perubahan yang signifikan dibandingkan data yang diterbitkan BPS Malang pada tahun 2013 tersebut. Melihat luas lahan yang semakin menyempit ini, praduga sementara peneliti adalah apakah usaha pertanian tersebut benar-benar kurang menguntungkan dibandingkan dengan sektor-sektor usaha yang lain. Jika sudah demikian bagaimana pengaruhnya bagi petani yang masih konsisten dengan usaha pertaniannya akan tetapi yang modal usahanya berasal dari kredit bank.

Petani yang membiayai usaha pertaniannya dari kredit bank dapat beresiko pada masalah pembayaran angsuran. Karena masalah ketidakpastian hasil panen akan berpengaruh pada *cashflow* petani. Hasil pencacahan lengkap dari BPS ST 2013 di Kota Malang, dari 6.059 rumah tangga, jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat pada subsektor tanaman pangan sebesar 3.782 rumah tangga. Sedangkan sektor yang lain seperti peternakan, hortikultura, perkebunan, budidaya tanaman kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya, dan perikanan berjumlah 2.829, 1.728, 1.417, 1.137, dan 189 rumah tangga. Berikut diagram jumlah RTP di Malang.

Gambar 1.1: Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) di Malang



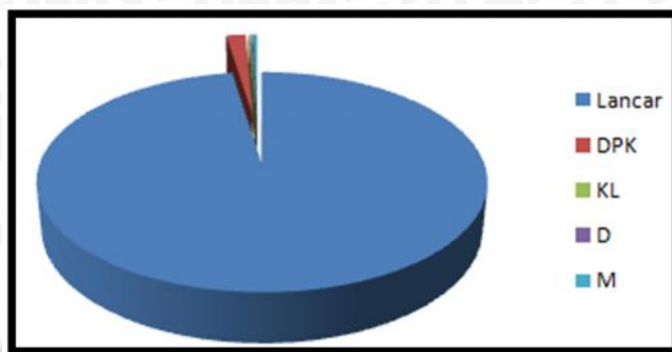
Sumber: BPS ST Malang, 2013.

Berdasarkan gambar di atas dari 6.059 RTP yang ada di Malang, 2.529 RTP dan ataupun kelompok tani mengajukan kredit di bank BRI Cabang Sutoyo Malang selama tahun 2012-2013. Dibandingkan dengan total petani dan ataupun kelompok tani yang mengajukan kredit pertanian di bank lain, BRI Cabang Sutoyo Malang memiliki lebih banyak nasabah untuk program kredit pertaniannya. Hal ini dikarenakan BRI memang sudah memiliki program yang tidak hanya eksis di tataran bisnis ritel maupun pegawai, melainkan juga mengangkat bisnis yang banyak merangkul kebutuhan masyarakat kecil khususnya yang akan dibahas di sini adalah sektor pertaniannya.

Sektor pertanian yang terdata dalam pengajuan kredit di BRI Cabang Sutoyo Malang juga bukan hanya pertanian ladang melainkan juga peternakan, perkebunan, dan perikanan. BRI Cabang Sutoyo Malang memasukkan pertanian-pertanian tersebut dalam tiga macam jenis kredit untuk diberikan bantuan pendanaan. Yaitu kredit pertanian dalam program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit pertanian besar yang masuk dalam kategori Ritel pertanian. Berdasarkan tiga macam jenis kredit pertanian tersebut ada sekitar 2.529 RTP yang tergabung kedalam tiga jenis kredit untuk sektor pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang.

Dari 2.529 RTP dan ataupun kelompok tani yang mengajukan dana ke bank, ada beberapa RTP dan ataupun kelompok tani yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran. Sekitar 2.399 masuk kategori lancar membayar angsuran, 112 masuk kategori DPK (dalam perhatian khusus), dan 18 RTP dan ataupun kelompok tani mengalami masalah dalam pembayaran angsuran (BRI Cabang Sutoyo Malang, 2014). Berikut ilustrasi grafik masalah pembayaran angsuran kredit petani pada bank:

Gambar 1.2: Ilustrasi Pembayaran Angsuran Kredit Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang



Sumber: Laporan Angsuran Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang (data diolah)

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa dalam perjalanan pengucuran kredit untuk sektor pertanian tidak selalu mendapatkan pengembalian dengan nilai kolektibilitas yang selalu lancar seperti yang diharapkan semua bank. Pun demikian dengan kredit pertanian di BRI Sutoyo. Ada sekitar 18 RTP dan ataupun kelompok tani yang tersandung tingkat kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). 112 nasabah masuk DPK dan 2399 nasabah berada pada kolektibilitas pengembalian kredit yang lancar.

Akan tetapi ketika diverifikasi lebih lanjut kepada bank, ternyata masalah yang sedikit ini tetap mempengaruhi kenyamanan bank dalam menjalankan misinya. Karena bagi bank pandangan masyarakat akan nama baik bank sangat penting. Keganjilan dalam 18 debitur yang menempati posisi kolektibilitas bermasalah adalah setelah diverifikasi pada bank ternyata ada beberapa nasabah yang mengalami masalah pembayaran akan tetapi datanya tidak dimasukkan kedalam neraca. Hal ini dikarenakan nilai tersebut sudah terhapuskan sebagai akibat dari klaim pada pihak penjamin. Sehingga penghapusan ini juga mempengaruhi nilai aset bank bersangkutan yang terlihat

lebih aman untuk sementara waktu, padahal sebenarnya masih ada utang-piutang yang bertanggung untuk diselesaikan.

Kenyataan bahwa klaim-klaim yang dapat menghilangkan nilai buruk pada neraca yang sebenarnya masih belum benar-benar bersih dari tanggungan tersebut harus dihadapi bank. Dalam hal ini bank tetap harus mengganti dana klaim dan dana-dana lain yang sebelumnya sudah diambil dari lembaga penjamin. Jika demikian maka bukankah nilai dari neraca yang disajikan tidak bisa dikatakan murni tanpa masalah untuk program kredit pertanian yang tersendat? Bukankah bank juga mengalami pembengkakan pengeluaran walaupun jika dilihat dari neraca seakan hanya sedikit masalah pengembalian pinjaman yang tertunggak? Maka bagaimanakah dinamika dalam kredit pertanian yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Sutoyo tersebut? Dan bagaimana pula kondisi kolektibilitas kreditnya selama tahun 2012-2013? Jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian tersebut akan peneliti sajikan pada sesi pembahasan.

Masalah mengenai dinamika kredit pertanian sampai yang tersandung pada kasus kolektibilitas bermasalah memang sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi yang khusus membahas mengenai dinamika dalam kredit pertanian dari sisi kajian ilmu ekonomi masih cukup jarang ditemukan. Beberapa yang banyak terlihat adalah mengkaji dari analisis hukumnya. Atau dari bidang pertanian yang langsung spesifik pada jenis pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani tersebut. Dari sini peneliti mencoba memfokuskan kajian dari sisi pandangan pihak bank dan penyikapannya terhadap dinamika kredit pertanian dan analisis kolektibilitasnya bagi seluruh kredit pertanian yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Sutoyo Malang.

Pandangan untuk memfokuskan penelitian pada dinamika kredit pertanian, kolektibilitas sampai nilai kolek yang bermasalah dari sisi bank salah satunya berdasar pada GAP *Non Performing Loan* (NPL) yang sangat besar antara tahun 2012 dan 2013 pada program kredit ini. Tahun 2012 NPL untuk pertanian 0%, akan tetapi pada tahun 2013 muncul nilai NPL lebih dari 20% diakhir tahun. Pada bulan Nopember sebesar 27,62% dan bulan Desember sebesar 27,53% (Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo, 2014). Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah terjadi gangguan kebijakan yang berasal dari internal dan eksternal bank, pengaruh masa-masa mendekati pemilu 2014 yang biasa disebut dengan tahun politik, faktor alam (bencana), "kenakalan" debitur atau ada penyebab lain sehingga di tahun 2012 yang nyaris bebas dari kasus kredit bermasalah menjadi berubah di tahun 2013 dengan kemunculan beberapa kasus kredit bermasalah untuk sektor pertanian.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin mengetahui dinamika dalam kredit pertanian baik itu tentang kelancaran pengembalian kredit maupun ketika kredit pertanian tersebut terjerembab dalam kasus kolektibilitas bermasalah melalui penelitian yang berjudul **Dinamika Kredit Sektor Pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013**. Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui apakah kredit pertanian yang diberikan oleh BRI Sutoyo memiliki pengaruh terhadap pembangunan pertanian bersangkutan.

BRI Cabang Sutoyo sendiri peneliti pilih berdasarkan rekomendasi dari BRI Cabang Kawi selaku kantor cabang BRI terbesar di Malang yang mengatakan bahwa di daerah Malang, petani-petani yang mengajukan kredit untuk usaha sektor pertanian lebih banyak melalui BRI Cabang Sutoyo. Sehingga berdasarkan rekomendasi itulah penelitian mengenai dinamika kredit pertanian di Malang dilakukan di BRI Cabang Sutoyo.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang penulis angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika kredit sektor pertanian dan kondisi kolektibilitas kreditnya di BRI Cabang Sutoyo Malang?
2. Bagaimana pengaruh adanya kredit pertanian terhadap pembangunan pertanian di bawah naungan BRI Cabang Sutoyo Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dinamika kredit sektor pertanian dan kondisi kolektibilitas kreditnya di BRI Cabang Sutoyo Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh adanya kredit pertanian terhadap pembangunan pertanian di bawah naungan BRI Cabang Sutoyo Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis atau peneliti sendiri dengan diselesaikannya skripsi ini diharapkan penulis dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli pada fenomena sosial-ekonomi yang ada dilingkungan sekitar sehingga penulis mampu memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Selain itu penulis juga berharap agar ilmu yang selama ini

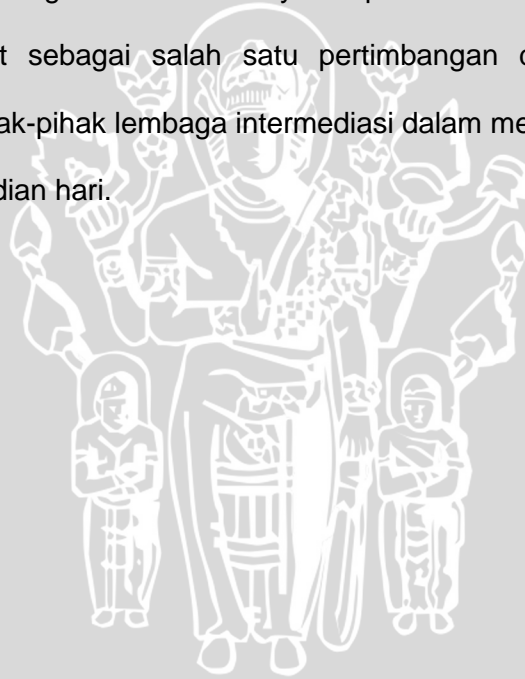
penulis dapatkan dibangku perkuliahan dapat penulis transfer untuk masyarakat dan bermanfaat bagi lebih banyak orang.

2. Bagi Institusi terkait (BRI Cabang Sutoyo Malang)

Bagi BRI, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu informasi tambahan untuk membantu memberikan pertimbangan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi yang diwajibkan untuk ikut serta menjaga stabilitas pangan nasional melalui dukungan pada sektor pertanian supaya tidak terjadi kerugian pada kedua belah pihak.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, dengan diselesaikannya skripsi ini diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan dalam pembuatan regulasi untuk pihak-pihak lembaga intermediasi dalam meminimalkan resiko kebijakan dikemudian hari.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Jenis-jenis Kreditnya

Menurut Sinulingga (2011), setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah. Sementara itu, pihak *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Jakarta mendirikan Kantor *Algemeene Volkscredietbank*.

Sinulingga (2011) menambahkan setelah institusi tersebut beroperasi lebih kurang 103 tahun yang dimulai tanggal 16 Desember 1895 sampai dengan 1998 dikeluarkan suatu keputusan yaitu diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992. Maka berdasarkan pasal 21 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 tersebut, Bank Umum di Indonesia harus berbentuk badan hukum seperti di bawah ini:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Perusahaan Daerah
- c. Koperasi
- d. Perseroan Terbatas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Bank Rakyat Indonesia telah berubah menjadi Bank Umum. Dengan berakibat pada UU No. 21 tahun 1968 dimana setiap bank umum (termasuk BRI) harus menyesuaikan bentuk hukumnya menurut UU Perbankan juga Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 maka Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peralihan bentuk hukum BRI menjadi persero tidak mengubah statusnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Maka fungsi BRI sama dengan bank umum

lainnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat berupa kredit, hanya saja BRI memiliki fokus pembiayaan UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka visi-misi BRI secara nasional adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi bank komersial yang terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan misinya adalah:

Misi: a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *Good Corporate Governance*.

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan visi misi tersebut, BRI dalam web resminya yaitu www.bri.co.id memberikan informasi mengenai produk usaha yang diberikan dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan visi misinya, yaitu:

a. Tabungan (Britama, Simpedes, Simpedes TKI, Haji, Britama dollar, Britama bisnis, Britama rencana, Britama valas, Britama Junio, dan TabunganKu).

b. Deposito (Rupiah, Valas, *On Call*).

c. Giro (Giro rupiah, Giro valas).

d. Pinjaman Mikro BRI (Kupedes)

e. Pinjaman Ritel (Agunan kas, Investasi, Modal Kerja, KMK Ekspor, KMK Konstruksi, KMK Konstruksi BO I, BRIGuna, Waralaba, SPBU,

Resi Gudang, Pemilikan Gudang, KMK Talangan SPBU, Batubara, Waralaba Alfamart, Kredit dengan pola angsuran tetap).

- f. Pinjaman Menengah (Kredit Agribisnis).
- g. Pinjaman Program (KPEN-RP, KKPE Tebu dan non tebu).
- h. Pinjaman KUR (KUR BRI, KUR TKI BRI).

Selain itu BRI juga memiliki banyak jasa-jasa seperti jasa bisnis internal BRI, bisnis lain bank, jasa keuangan bank, jasa kelembagaan bank, *e-banking*, treasury, dan jasa internasional. Dari banyaknya produk dan jasa tersebut BRI Cabang Sutoyo Malang juga memiliki produk tabungan dan giro yang hampir sama hanya saja pada produk kreditnya yang berbeda. BRI Cabang Sutoyo Malang membagi produk kredit menjadi 5 yaitu:

- a. Kredit Ritel (pertanian dan non pertanian)
- b. Kredit Konsumtif (kredit untuk pegawai dan pensiunan)
- c. KUR Mikro dan KUR Ritel
- d. CBK (*consumer banking* seperti KKP dan KPR)
- e. KKPE (tebu dan non tebu)

Sesuai dengan jenis-jenis produk kredit tersebut peneliti hanya fokus pada kredit yang diberikan untuk sektor pertanian yang kebetulan tergabung dalam bagian produk kredit ritel, KKPE, dan KUR. Menurut informasi yang diterbitkan oleh infobanknews.com edisi 16 Mei 2013, pada tahun 2012 kemarin jumlah BRI Unit bertambah dari 4.849 unit menjadi 5.000 unit. Teras BRI yang mulai dikembangkan pada 2009 pun jumlahnya meningkat menjadi 1.778 unit pada 2012 dari 217 unit pada 2009. Terakhir, BRI juga mengembangkan Teras Mobile yang jumlahnya kini mencapai 350 unit. Total *outstanding* kredit mikro BRI pada 2012 mencapai Rp106,8 triliun, tumbuh 18,4% dibandingkan dengan 2011. Kucuran kredit mikro BRI disumbang program Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlah kredit yang disalurkan melalui Kupedes meningkat dari Rp 78,9

triliun pada 2011 menjadi Rp 91,6 triliun pada 2012. Sementara, kredit mikro yang berasal dari program KUR meningkat dari Rp11,2 triliun pada 2011 menjadi Rp15,1 triliun pada 2012.

Pencapaian gemilang BRI di bisnis mikro selalu sukses mendorong bisnis bank ini, pada 2012 lalu, laba bersih BRI kembali melonjak. Tahun lalu laba bank ini mencapai Rp18,5 triliun, naik 22,79% dibandingkan dengan 2011 yang hanya Rp15 triliun. Peningkatan laba didorong oleh strategi BRI yang fokus menggarap segmen UMKM. Pada Desember 2012 pendapatan bunga segmen mikro menyumbangkan sekitar 45% dari total pendapatan BRI.

Keberhasilan BRI juga didorong oleh lima semangat kerja BRI yaitu:

- a. Integritas
- b. Profesionalisme
- c. Kepuasan Nasabah
- d. Keteladanan
- e. Penghargaan Kepada SDM

Dari 5 semangat kerja tersebut mewujudkan *main goal* dari semua programnya yaitu dapat melayani permohonan kredit secara komprehensif (*end to end*) dengan professional.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu saja peneliti membutuhkan referensi penelitian terdahulu sebagai panduan dan pembanding untuk penelitian berikutnya. Hasil-hasil penelitian tersebut akan membantu peneliti baru untuk membuat keputusan mengenai fokus topik mana yang akan diangkat juga hasil penelitian mana yang perlu atau bisa dilanjutkan pengujiannya. Berikut beberapa cuplikan hasil dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait kredit pertanian.

Tabel 2.2: Hasil Penelitian Terdahulu yang Berhubungan Dengan Kredit Pertanian dan Kredit Bermasalah

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dicky Triwibowo	2009	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Nasabah Di Sektor Perdagangan Agribisnis (Kasus Pada BPR Rama Ganda Bogor).	Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengembalian kredit pada sektor perdagangan agribisnis yang mengalami kredit bermasalah adalah jumlah tanggungan keluarga, pengalaman pengambilan kredit, omzet usaha, dan beban bunga.
2.	Virgitha Isanda Agustania	2009	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Kasus Pada Pt Bank Bri Unit Cimanggis, Cabang Pasar Minggu)	Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR adalah omzet usaha, jumlah pinjaman, dan pinjaman lain. Omzet usaha dan tingkat pinjaman memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan pinjaman lain memiliki pengaruh dan keterkaitan negatif dengan tingkat pengembalian kredit.
3.	Akhmad Rizqul Karim	2006	Evaluasi Pengembalian Kredit P4K Oleh Kelompok Petani Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta.	Pengembalian kredit P4K di kecamatan Banguntapan masih bermasalah karena tingkat tunggakan kredit melebihi fault rate yang ditetapkan. Tunggakan kredit yang terjadi disebabkan karena penyalahgunaan dana oleh pengurus, kurang berjalannya usaha anggota, penggunaan dana kredit diluar tujuan awal oleh anggota, tidak ada dana talangan dari Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) dan koordinasi yang tidak baik pada KPK macet.
4.	Olyvia Darussalam	2013	Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di Pt. Bank Sulut Cabang Utama Manado	Berdasarkan ekstraksi analisis faktor telah memperoleh delapan faktor baru penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado yaitu pilihan, Internal bank, Internal debitor, Tingkat keberhasilan, Manajemen diri, Kewajiban, Eksternal dan Karakter debitor. Faktor paling dominan adalah Faktor Pilihan dengan indikatornya yaitu Rentang waktu pembayaran kredit, penetapan suku bunga bank, dan besarnya jumlah kredit yang diterima.
5.	Ade Supriatna	2008	Aksesibilitas Petani Kecil Pada Sumber Kredit Pertanian Di Tingkat Desa: Studi Kasus Petani Padi Di Nusa Tenggara Barat	Dalam memenuhi pembiayaan usaha tani, delapan puluh persen petani di samping menggunakan modal sendiri juga melakukan pinjaman kredit dan hanya dua puluh persen dapat memenuhi dengan modal sendiri.

Sumber: Penelitian dan skripsi terdahulu yang diolah.

Dari hasil penelitian di atas akan penulis jadikan referensi untuk penelitian lanjutan yang penulis susun dan tetap disesuaikan dengan tema yang diangkat.

2.3. Program Kredit Pertanian

Pada dasarnya pertanian memang wajar dan selayaknya mendapat perhatian khusus. Mengupas kredit pertanian sebenarnya harus mencakup segala aspek kehidupan masyarakat seperti kebiasaan bercocok tanam, kemampuan pemberian jaminan, sifat hak kepemilikan dan luas tanah, apa yang dibutuhkan, cara menghitung dan lain sebagainya. Menurut Tjiptoadinugroho (1994) dalam bukunya yang membahas khusus masalah perkreditan disektor pertanian, mengatakan bahwa budaya gotong royong masyarakat desa memiliki mental yang sangat tinggi mengenai perasaan malu apabila tidak mampu melunasi hutang dan diketahui para tetangga atau bahkan sampai pada tahap penyitaan rumah, semua ini merupakan faktor-faktor yang sebenarnya sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan bantuan perkreditan untuk pertanian.

Sebelum menginjak pada penjelasan lebih lanjut mengenai kredit pertanian, berikut peneliti sajikan beberapa pengertian kredit menurut para ahli terlebih dahulu sebagai penyegaran penguatan. Kredit berasal dari kata credere (bahasa Italia) yang artinya percaya. Jadi orang yang mendapat kredit dari bank berarti orang itu dipercaya untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Pengertian kredit menurut Rivai dan Permata (2007) kredit adalah:

“Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (nasabah atau debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

Menurut Iskandar (2008) kredit merupakan:

“Piutang bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank, maka pelunasannya (repayment) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan.”

Sedangkan pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU nomor 10 tahun 1998, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari tiga jenis pengertian di atas, peneliti menyimpulkan pada dasarnya kredit merupakan hubungan kepercayaan antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) dalam hal pinjam meminjam baik uang maupun jasa. Kredit sendiri memiliki prinsip-prinsip umum yang biasa dikenal dengan 5C untuk dikatakan *qualified* dicairkan. Prinsip 5C sesuai dengan yang disampaikan pada pusdiklat BRI Pusat adalah sebagai berikut:

- a. *Character*. Pada prinsip ini kreditur melihat watak atau sifat calon debitur, alasan permohonan kredit, reputasi usaha, riwayat hubungan dengan bank, informasi usaha, keuangan dan lingkungan.
- b. *Capacity*. Pada prinsip ini kreditur melihat kemampuan calon debiturnya dalam menjalankan usaha dan kemampuan untuk membayar pengembalian kredit.
- c. *Capital*. Pada prinsip ini kreditur melihat kemampuan calon debiturnya dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri dan kemampuan mengelola pertumbuhan modal selama usaha berjalan.
- d. *Condition*. Pada prinsip ini kreditur melihat faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi usaha calon debiturnya seperti faktor *supply* dan *demand* usaha, perkembangan teknologi, siklus perekonomian, regulasi pemerintah yang sedang berlangsung.
- e. *Collateral*. Pada prinsip ini kreditur meminta jaminan yang dimiliki calon debiturnya untuk mendorong dan memastikan bahwa debitur

terkait akan melunasi kewajibannya sesuai perjanjian sekaligus sebagai pemberi hak dan kekuasaan bank untuk mendapatkan pelunasan ketika terjadi wanprestasi dari debitur.

Pada dasarnya setiap jenis kredit yang akan dicairkan bank pasti melewati tahap 5C terlebih dahulu, pun demikian dengan kredit pertanian yang dibahas dalam skripsi ini.

Kredit pertanian yang dimaksud merupakan kredit yang membiayai sektor perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertanian ladang. Jadi inti dari pertanian disini adalah pertanian secara umum dan bukan hanya pertanian ladang saja. Pembiayaan di bidang pertanian ini dapat berupa pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dari waktu ke waktu program kredit pertanian telah mengalami berbagai perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembaliannya.

Menurut Ashari (2009), sejak dahulu pemerintah juga memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha pertanian dan usaha kecil yang lain melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) atau dana bergulir, maupun subsidi bunga pada beberapa program kredit tertentu, misalnya jenis program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Walaupun pemerintahan silih berganti, kebijakan tersebut terus dipertahankan dengan argumentasi bahwa modal merupakan faktor yang sangat penting dalam lapangan usaha pun dengan pertanian.

Didalam kredit pertanian yang diselenggarakan lembaga perbankan tentu berhubungan dengan analisis tingkat *demand* dan *supply* kredit bagi nasabah pertanian tersebut. Analisis *demand* dan *supply* kredit ini bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan kredit pertanian yang disalurkan oleh bank dengan tingkat pengembalian kredit dan profitnya. Adapun pengertian dari *demand* kredit

itu sendiri menurut Pasha (2009) dalam jurnalnya menyebutkan analisis *demand* dan *supply* kredit digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi disintermediasi perbankan. Asumsi yang digunakan adalah penyaluran kredit tidak selalu berada pada kondisi yang seimbang antara penawaran dan permintaannya.

Untuk menentukan keberlangsungan dan perkembangan suatu kredit pihak perbankan mengformulasikan dengan formula sebagai berikut:

$$Lt = \min (Lt^D, Lt^S)$$

Jika $Lt^D > Lt^S$ berarti penurunan penyaluran kredit disebabkan karena penawaran kredit. Jika $Lt^D < Lt^S$ maka penurunan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan permintaan kredit. Jadi melalui formula itu perbankan akan mengukur seberapa besar bank menyiapkan *plafond* untuk masing-masing jenis atau produk kredit yang mereka kucurkan. Pun demikian dengan kredit pertanian yang akhir-akhir ini sering dibahas oleh banyak peneliti untuk dilihat keefektifan dan kebermanfaatan program yang berjalan.

2.3.1. Jenis-jenis Kredit Pertanian BRI

Kredit pertanian yang diberikan oleh BRI sebenarnya mirip dengan bank-bank yang lain. Seperti contohnya, bank Mandiri. Menurut informasi yang diterbitkan oleh neraca.co.id pada 4 Mei 2012, Direktur Komersial Bank Mandiri, Sunarso menyatakan bahwa:

“Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan kepada 600 orang petani untuk membiayai kebutuhan penanaman 2400 hektar padi di Sumatera Selatan. “Kredit akan disalurkan dengan skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) senilai Rp15 miliar.”

Selain itu Bank Mandiri juga menyelenggarakan program kredit KUR. Berikut pernyataan Direktur Commercial dan Business Banking Bank Mandiri Sunarso di Jakarta, 3 Mei 2012.

"Dari kredit UKM Rp30 triliun tersebut, sebesar 24% atau sekitar Rp7,2 triliun telah disalurkan ke sektor hulu termasuk diantaranya adalah pertanian tanaman pangan."

Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa bank-bank lain pun juga menyalurkan kredit program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian Indonesia. Hanya saja karena BRI telah memfokuskan segmennya pada usaha mikro kecil dan menengah maka dalam hal kontribusi terhadap kucuran kredit pertanian BRI sebagai bank yang bernaung dalam BUMN lebih dulu memulai dan tetap konsisten sampai sekarang. Di daerah Malang pun, menurut pernyataan dari manajemen BRI cabang Kawi selaku pusat dari seluruh BRI cabang dan unit yang ada di Malang mengatakan bahwa untuk kucuran kredit sektor pertanian memang lebih banyak dilakukan oleh BRI Cabang Sutoyo.

Jenis-jenis bantuan modal dari BRI untuk sektor pertanian menurut Ashari (2009) adalah Kredit Usaha Tani (KUT), BIMAS (menangani pengembangan pertanian dan swasembada beras), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K). Dalam referensi yang lain yaitu pada web umum integrasi BRI menyebutkan program kredit pertanian yang diberikan BRI berupa Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, KUR *Linkage* Program (Executing), KUR *Linkage* Program (*Channelling*), dan Ritel. Sedangkan di BRI Cabang Sutoyo Malang seperti yang telah diulas di bagian pendahuluan, kredit pertanian dikucurkan melalui tiga jenis fasilitas kredit yaitu KKPE, KUR pertanian, dan ritel pertanian dengan spesifikasi masing-masing kredit akan dijelaskan pada bab pembahasan (lihat tabel 4.3).

2.3.2. Skema Kredit Pertanian yang Diprogramkan BRI

Membahas skema pengajuan kredit, suku bunga, aturan pembayaran angsuran sekaligus denda atau *punishment* ketika terjadi gagal bayar. Untuk kredit pertanian, karena program ini tergabung di beberapa produk kredit, maka untuk skemanya peneliti sesuaikan dengan masing-masing program kredit yang memasukkan pertanian didalamnya, yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, KUR *Linkage Program (Executing)*, KUR *Linkage Program (Channelling)*, dan Ritel. Berikut model skema masing-masing kredit pertanian di BRI:

1. Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)-Tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha PG (Pabrik Gula).

Ketentuan:

Petani

- a. Menjadi anggota Kelompok Tani atau Koperasi.
- b. Menggarap lahan sendiri atau petani penggarap.
- c. Bila petani penggarap, disertai surat keterangan pemilik lahan yang diketahui Kepala Desa.
- d. Luas lahan maksimal 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafond kredit Rp. 50 juta per individu.
- e. Berusia di atas 21 th atau sudah menikah.
- f. Menjadi binaan koperasi atau usaha terkait mitra atau instansi terkait.

Kelompok Tani

- i. Mempunyai anggota yang melaksanakan usaha atau budidaya yang dapat dibiayai dengan KKP-E.

- j. Kelompok Tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
- k. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- l. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
- m. Kelompok Tani harus memiliki rekening simpanan di BRI.
- n. Kelompok Tani telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Usaha Pabrik Gula (PG).

Koperasi

- a. Koperasi Primer sudah berbadan hukum (Akta Pendirian dan Perubahannya).
- b. Memiliki perijinan yang diperlukan, legalitas dan usaha di sektor pertanian.
- c. SIUP
- d. TDP
- e. NPWP
- f. Memiliki pengurus yang aktif.
- g. Memiliki anggota yang terdiri dari petani yang berusaha dalam budidaya yang dapat dibiayai KKP-E.
- h. Koperasi harus memiliki rekening simpanan di BRI.
- i. Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Usaha Pabrik Gula (PG).

Mitra Usaha

- a. Berbadan Hukum dan memiliki usaha terkait dengan budidaya tebu dan atau dibidang pengolahan tebu atau untuk industri bahan bakar nabati.
- b. Bermitra dengan Kelompok Tani atau Koperasi.

- c. Bertindak sebagai penjamin pasar tebu petani atau Kelompok tani atau Koperasi sesuai kesepakatan.
- d. Telah memiliki perjanjian kerjasama dengan kelompok tani atau koperasi yang mewakili petani peserta.
- e. Bertindak sebagai penjamin kredit atau Avalis.

Persyaratan:

Kredit

- a. Kebutuhan indikatif KKP-E per Ha maksimal Rp 18 juta (sesuai ketentuan Deptan yang berlaku).
 - b. Suku bunga*): Suku Bunga : LPS + 5%; beban petani 7 %; subsidi 5%.
 - c. Agunan: Agunan pokok Fidusia atas kegiatan usaha yang dibiayai seperti hasil gula atau tebu milik petani sesuai penyerahan hasil tebu yang berlaku di Mitra Usaha Pabrik Gula (PG). Agunan tambahan Penjaminan oleh Mitra Usaha Pabrik Gula (PG) sebagai Avalis dalam bentuk Corporate Guarantee.*) dapat berubah sesuai ketentuan yang terbaru.
2. Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Usaha terkait Penjamin. Tujuan:
- a. Meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan K kepada Bank.
 - b. Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial).
 - c. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Ketentuan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

KUR Mikro

- a. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak.
- b. Memiliki legalitas yang lengkap: KTP atau SIM, KK
- c. Lama usaha minimal 6 bulan.

KUR Ritel

- a. Calon debitur adalah individu (perorangan atau badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
- b. Memiliki legalitas yang lengkap: Individu: KTP atau SIM, dan KK. Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan atau Akte Notaris. Koperasi atau Badan Usaha Lain: Sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Lama usaha minimal 6 bulan.
- d. Perijinan: Plafond kredit s/d Rp. 100 juta: SIUP, TDP dan SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa. Plafond kredit > Rp 100 juta: Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.

KUR Linkage Program (Executing)

- a. Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.
- b. Memiliki legalitas yang lengkap: AD/ART, memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang.
- c. Pengurus aktif.
- d. Lama usaha minimal 6 bulan.

KUR Linkage Program (Channelling)

- a. Calon debitur adalah: *End user*, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan.
- b. Lembaga *Linkage*, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- c. Legalitas: *end user*, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.

Berikut syarat-syarat dari masing-masing jenis kredit:

KUR Mikro

- a. Plafond kredit maksimal Rp 20 juta.
- b. Suku bunga efektif maks 22% per tahun.
- c. Jangka waktu dan jenis kredit:

KMK: maksimal 3 tahun.

KI: maksimal 5 tahun.

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

KMK: maksimal 6 tahun.

KI: maksimal 10 tahun.

- d. Agunan:

Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).

Tambahan: Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

KUR Ritel

- a. Plafond kredit > Rp 20 juta s/d Rp 500 juta.

- b. Suku bunga efektif maks 14 % per tahun.
- c. Jangka waktu dan jenis kredit:

KMK: maksimal 3 tahun.

KI: maksimal 5 tahun.

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

KMK: maksimal 6 tahun.

KI: maksimal 10 tahun.

- d. Agunan:

Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak).

Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

KUR Linkage Program (Executing)

- a. Plafond kredit: Plafond maks Rp 2 M.
- b. Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp 100 juta.
- c. Jangka waktu dan jenis kredit:

KMK: maksimal 3 tahun.

KI: maksimal 5 tahun.

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

KMK: maksimal 6 tahun.

KI: maksimal 10 tahun.

- e. Suku bunga:

Lembaga Linkage: Efektif maksimal 14 % per tahun.

Dari Lembaga Linkage ke UMKM: Efektif maksimal 22 %.

f. Agunan:

Pokok: Piutang kepada nasabah.

Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

KUR Linkage Program (Channelling)

a. Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.

b. Jangka waktu dan jenis kredit:

KMK: maksimal 3 tahun.

KI: maksimal 5 tahun.

Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi.

KMK: maksimal 6 tahun.

KI: maksimal 10 tahun.

c. Suku bunga : sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.

d. Agunan:

Pokok: Piutang kepada nasabah.

Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. Adapun skema kredit pertanian untuk BRI Cabang Sutoyo Malang, secara administratif sama dengan yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya hanya pada penyesuaian jenis program terhadap kondisi perilaku lapang masyarakat. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada sesi pembahasan.

2.3.3. Mekanisme Kredit Pertanian

Menurut Darmawanto (2008), arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai *lembaga intermediasi*. Artinya perbankan tetap menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Proses pengucuran kredit pertanian untuk program yang berasal dari pemerintah (KKPE) dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun

berdasarkan musyawarah anggota kelompok. RDKK tersebut kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan teknis, setelah ditanda tangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada Dinas tehnik yaitu dinas yang membidangi pertanian, setelah disetujui oleh dinas teknis baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (Bank pelaksana).

Darmawanto (2008) juga menjelaskan bahwa Petugas Penyuluh Lapangan sebagai pelaksana tugas dari Dinas Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani atau kelompok tani dalam menerapkan program-program pemerintah. Peranan pembinaan dari Dinas Teknis dalam proses penyusunan RDKK tersebut akan menentukan validitas data kebutuhan kredit bagi petani.

Data-data yang tersusun dalam RDKK merupakan sumber data utama bagi petugas bank (Analisis Kredit) yang akan digunakan untuk menganalisis kebutuhan riil dari para petani maupun kelompok tani. Berkas permohonan kredit dengan dilampiri RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis selanjutnya akan dianalisis kelayakannya oleh bank. Sedangkan untuk kredit pertanian jenis KUR dan ritel mengikuti mekanisme bank (Darmawanto, 2008).

Yang dimaksud dengan mengikuti mekanisme bank disini adalah calon debitur tidak harus membentuk kelompok seperti pada program KKPE yang kemudian dari kelompok tersebut berurusan dengan beberapa prosedur khusus melainkan mereka bisa mengajukan secara personal langsung ke bank atau menemui AO program bank pelaksana. Selanjutnya, calon debitur tersebut menyediakan persyaratan administrasi yang diminta bank. Setelah syarat administrasi dipenuhi bank akan melakukan analisis kredit seperti pada program kredit yang lain. Terakhir ketika semua syarat telah terpenuhi termasuk akad perjanjian dengan calon debitur maka kredit yang diajukan sudah siap untuk dicairkan.

Bersinergi dengan jenis kredit pertanian yang diajukan, keputusan bank menerima maupun menolak permohonan kredit akan melihat pada pola penyalurannya. Pola penyaluran kredit menurut Darmawanto (2008) yaitu:

1. Kredit dengan *pola penyaluran Executing*, disini bank sebagai pelaksana, bank berhak untuk menolak setiap permohonan yang tidak memenuhi syarat bank teknis walaupun telah disetujui oleh dinas teknis, dengan pola ini resiko atas kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank.
2. Kredit dengan *pola penyaluran Chanelling*, disini bank sebagai penyalur dan keputusan atas permohonan kredit ditentukan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini kedudukan bank hanya sebagai penyalur saja dan tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, sehingga bank tidak akan menganalisa sesuai standar bank teknis yang ada dan cukup berdasarkan pada RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas teknis.

Dari kedua pola penyaluran tersebut, pola penyaluran *chanelling* bagi bank tidak ada permasalahan. Karena pada pola ini fungsi bank pada dasarnya tidak lebih sebagai pelaksana (*handing bank*). Sedangkan pada pola penyaluran *executing*, dibutuhkan analisis lebih mendalam sesuai ketentuan teknis yang dimiliki masing-masing bank walaupun RDKKnya telah disetujui oleh dinas teknis terkait.

Dengan dilakukan analisis sesuai ketentuan bank teknis, bank akan menentukan layak dan tidaknya permohonan kredit maupun tersedianya jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang mendukung upaya bank untuk memperkecil resiko kredit bermasalah. Dalam penyalurannya bank harus mempertimbangkan resiko yang ada, sehingga untuk memperkecil resiko maupun mengalihkan resiko yang ada, bank akan bekerja sama dengan Lembaga Asuransi kredit maupun Lembaga Penjaminan Kredit.

Dari mekanisme yang telah disusun sebaik mungkin untuk meminimalkan munculnya kredit-kredit bermasalah dan memaksimalkan peran daripada kredit

pertanian itu sendiri, tidak dapat dipungkiri hal tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan kredit bermasalah. Pembahasan lebih rinci mengenai penyebab kredit bermasalah terjadi dan cara penyelesaiannya akan dijelaskan dibawah ini.

2.4. Dinamika Pengembalian Kredit Pertanian

Perbankan merupakan sub sistem keuangan yang paling dominan di Indonesia. Sekitar 77% pembiayaan sektor riil telah di *cover* oleh kredit perbankan. Stiglitz dan Greenwald dalam Pasha (2009) menyatakan bahwa perbankan lebih superior dibandingkan dengan lembaga intermediasi lain khususnya dalam hal meminimalkan masalah informasi asimetri dan biaya transaksi. Hasil studi di Philipina oleh Lamberte (1999), dengan menggunakan metode *causality test*, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output akan berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan (Pasha, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas BRI Cabang Sutoyo Malang yang merupakan lembaga intermediasi juga berperan cukup signifikan dalam memberikan kredit bagi masyarakat Malang yang meliputi wilayah Kabupaten Malang, sebagian Kota Batu, dan daerah kaki Gunung Semeru. Jangkauan yang cukup luas bagi BRI yang berada di Malang non Kota Batu.

Dari semua wilayah jangkauan dalam kredit pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang tersebut, ada beberapa wilayah yang mengalami gejala kredit bermasalah untuk pengembalian kredit pertaniannya. Khususnya daerah kaki gunung Semeru dengan jenis pertanian ladang dan beberapa wilayah di Kota Malang dimana nasabahnya bergerak pada bisnis perikanan darat. Pada titik ini, sesuai dengan judul penelitian yang membahas mengenai dinamika pengembalian kredit pertanian maka dinamika masalah-masalah dalam pengembalian kredit pertanian pun juga perlu untuk diketahui. Lebih jelasnya

mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah secara teori terlebih dahulu akan dibahas pada paragraf di bawah ini.

Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Diranah pertanian, tidak jarang ditemui masalah *cost of living* bagi petani dikarenakan tanah yang tersedia, biaya produksi, dan hasil panen, tidak selalu menjamin mampu memenuhi semua kebutuhan petani. Apabila petani-petani ini tidak memiliki mata pencaharian lain, maka hal ini bisa menjadi masalah bagi kredit pertanian itu sendiri. Bagaimana petani mampu membayar bunga dan angsuran dengan lancar? Belum lagi banyaknya penduduk yang harus dilayani dalam kebutuhan kredit untuk pertanian tersebut.

Menurut Tjiptoadinugroho (1994) prosedur pemeriksaan, pembayaran dari dan ke tempat lokasi yang jauh masuk pedalaman bahkan sangat terpencil di lereng gunung, semuanya merupakan tantangan bagi program kredit untuk pertanian. Dalam hal ini Sutojo (1997) dalam bukunya yang berjudul Menangani kredit bermasalah: konsep, teknik, dan kasus, membagi penyebab kredit bermasalah dalam 3 macam sumber, yaitu: (i) faktor intern bank kreditur, (ii) ketidaklayakan debitur, (iii) faktor-faktor ekstern.

Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:

- a. Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur.
- b. Lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi kredit bank.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Adapun faktor debitur sebagai penyebab kredit bermasalah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perorangan dan atau usaha terkait atau korporasi. Secara perorangan, sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit adalah penghasilan tetap mereka. Apabila terjadi gangguan pada keseimbangan penghasilan tersebut maka akan mengganggu likuiditas keuangan nasabah sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan atau cicilan kredit.

Penyebab kredit bermasalah yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, perceraian, itikad tidak baik, dan lain-lain. Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah, menurut Behrens (1994), ada tiga faktor utama penyebab kredit bermasalah, yaitu salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengalaman dan pengetahuan pemilik usaha terkait dalam menjalankan usahanya, dan penipuan (*fraud*).

Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah sesuai dengan yang dibahas pada seminar Penghapusan Kredit Macet: Problematika dan Pemecahannya yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, oleh Erman Munzir, Deputy Direktur Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kegagalan usaha debitur.
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggungjawab.
- d. Musibah yang menimpa usaha terkait debitur.

Gejala awal munculnya kredit bermasalah menurut Sutojo (1997) adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit.
- b. Penurunan kondisi keuangan debitur.

- c. Penyajian laporan keuangan secara tidak benar.
- d. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
- e. Penurunan nilai jaminan.
- f. Frekuensi pergantian tenaga inti.
- g. Problem keluarga atau pribadi.

Dari tujuh gejala tersebut bank selalu bekerja keras untuk mengantisipasi terjadinya kredit-kredit bermasalah yang khususnya bisa berakibat pada terjadinya kredit macet.

Tabel 2.3: **Resiko Kredit Pertanian (Wilayah Pedesaan)**

Jenis Resiko	Bentuk Resiko
Resiko Pasar	Ketidakstabilan harga, akses pasar yang tidak biasa, infrastruktur yang buruk, informasi tidak memadai.
Resiko Produksi	Produktivitas lahan, hama, penyakit, resiko pasca panen.
Resiko Produsen	Pengalaman, teknologi, kemampuan manajemen.
Resiko Iklim	Kekeringan, banjir, angin, pembekuan, hujan es, gelombang panas.

Sumber: Goldberg dan Palladini, 2011.

Dan dari semua penjabaran diatas secara garis besar penyebab kredit bermasalah terbagi menjadi dua kategori yaitu resiko bisnis dan resiko non bisnis. Resiko bisnis yaitu bentuk resiko usaha pertanian yang berhubungan dengan masalah-masalah penyebab kerugian dalam bisnis termasuk yang disebabkan oleh faktor alam. Sedangkan resiko non bisnis berasal dari kurang baiknya itikad debitur, kelalaian ao program dalam monitoring dan *survey* lapang serta masalah-masalah personal seperti yang sudah disebut diatas.

2.5. Jenis-jenis Dinamika Kredit Bermasalah

Menurut Sutojo (1997), dalam dunia perbankan, kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila:

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya.
- b. Tidak melunasi pinjamannya sama sekali.
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Dengan ketentuan perbankan yang disempurnakan pada tanggal 29 Mei 1993 (PAKMEI 1993), Bank Indonesia membagi kredit bermasalah menjadi tiga golongan berdasarkan derajat kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali kredit. Tiga golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kredit kurang lancar. Disebut kurang lancar apabila terjadi tunggakan pada pembayaran kredit berdasarkan batas waktu yang disesuaikan dengan jenis kredit yang diminta.
- b. Kredit diragukan. Disebut kredit diragukan apabila ia telah masuk pada ranah kurang lancar dan memiliki kriteria lain yaitu kredit tersebut masih bisa diselamatkan dengan nilai jaminan kredit tidak kurang dari 75% dari nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak. Kriteria lainnya kredit tersebut tidak dapat diselamatkan tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% dari nilai pinjaman pokok dan bunga yang tertunggak.
- c. Kredit macet. Disebut macet apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - (i) Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kurang lancar, dan diragukan.

- (ii) Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit.
- (iii) Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Usaha Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada usaha terkait asuransi kredit.

Setelah kredit bermasalah sudah masuk ranah macet maka yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya bagi program kredit yang lain. Lebih jelasnya akan dipaparkan pada poin di bawah ini.

2.6. Pengaruh Kredit Bermasalah Bidang Pertanian bagi Perbankan

Sebelum beranjak pada pembahasan pengaruh kredit bermasalah bagi kesatuan kredit perbankan, sebelumnya peneliti berikan dahulu mengenai pengertian dasar tentang kredit bermasalah. Mengenai kredit bermasalah, diawali dengan debitur yang mengingkari janji mereka dalam membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran sama sekali. Dengan demikian mutu kredit menurun. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah besar. Sehingga bank harus memberikan perhatian khusus dalam menyelesaikan kasus kredit bermasalah tersebut.

Kredit bermasalah tentu saja memiliki pengaruh atau dampak bagi aktivitas bank maupun program kredit yang lain. Bahkan jika kredit bermasalah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia maka juga akan berdampak pada

kehidupan ekonomi atau moneter negara. Berikut pembagian dampak yang ditimbulkan dari kredit bermasalah:

- (i) Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit. Semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, makna semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan serta semakin besar pula biaya yang harus ditanggung oleh bank pelaksana untuk mengadakan cadangan tersebut. Selain itu, bank yang menanggung beban kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami penurunan profitabilitas dan modal yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan terhadap *capital adequacy ratio* (CAR). Dan jika bank tidak mampu menangani masalah CARnya maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank itu sendiri.
- (ii) Dampak terhadap dunia perbankan. Apabila penurunan mutu kredit dan profitabilitas demikian parahnya mengganggu likuiditas keuangan dan solvabilitas bank maka ini akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank dan bisa berakibat pada penarikan secara serentak terhadap deposit nasabah pada bank. Dan jika ada bank yang sampai mengalami penarikan dana besar-besaran maka akan berdampak pada nasabah di bank lain untuk melakukan hal yang sama karena kekhawatiran akan keamanan keuangan mereka yang tersimpan di bank. Apabila kondisi ini terjadi maka perbankan akan mengalami kerugian dan kehancuran.
- (iii) Dampak terhadap kehidupan ekonomi atau moneter negara. Hal ini merupakan kelanjutan dari 2 poin sebelumnya. Ketika keuangan bank benar-benar tidak sehat, maka kesempatan bank untuk membiayai operasi dan perluasan operasi debitur yang lain akibat terhentinya perputaran dana yang bank pinjamkan akan memperkecil kesempatan pengusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi. Dengan demikian *multiplier effect* dari perluasan usaha bisnis atau investasi proyek baru, termasuk penyediaan

lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan devisa, substitusi impor dan sebagainya, juga tidak akan muncul. Hal itu kan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Hal-hal yang menyebabkan dan berhubungan dengan urusan kredit bermasalah memang sudah selayaknya untuk mendapat penanganan khusus. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

2.7. Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Kredit Sektor Pertanian

Faktor kepercayaan menjadi dasar utama dari keberhasilan pemberian kredit, akan tetapi dalam pemberian kredit pada sektor pertanian pada khususnya, faktor yuridis formal sulit disajikan secara lengkap hal ini sebagai kelemahan dari para petani dalam mengadministrasikan keuangannya. Menurut kenyataan, para petani padi yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan kebutuhan pokok dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, mempunyai pola tata hidup yang sama, musim hujan, musim panen, kebutuhan menggarap, kebutuhan untuk hidup sehari-hari boleh dikata sama semua, jadi sudah terdapat suatu pola, satu irama bekerja dan hidup yang sama dan berlangsung terus sepanjang masa.

Faktor kesamaan pola petani dapat dipakai sebagai pangkal tolak pemikiran dalam mempertimbangkan pemecahan masalah kredit tani. Pola ini berguna untuk menerapkan waktu kapan kredit diperlukan, kapan harus membayar kembali. Kebutuhan kredit dapat diukur dari luas tanah yang digarap, jadi sebenarnya dilihat sampai sebatas itu saja persoalan pertimbangan sudah mempunyai titik pegangan, artinya *feasibility study* dan *physical planingnya* mudah dilihat secara umum berdasarkan pola tersebut.

Pada sektor pertanian, kegunaan kredit secara teori dapat diperhitungkan kegunaannya, tetapi dalam praktek sukar dijajagi kebenarannya. Karena dalam

sektor ekonomi pertanian khususnya dan usaha kecil pada umumnya, dalam penggunaan uang tersembunyi keperluan *cost living* yang susah dipisahkan dalam perhitungan (Nugroho, 1994). Belum lagi jika tersembunyi kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya yang tentunya tidak dapat dilihat secara wajar. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu unsur yang menjadi kendala bagi petugas bank dalam menghitung kebutuhan riil petani untuk disesuaikan dengan kebutuhan kredit yang diajukan.

Penerapan kredit di sektor pertanian untuk mencapai tujuan pemberian kredit yang aman, untung dan manfaat, harus benar-benar membutuhkan suatu kejelian tersendiri, karena pada kredit sektor ini sangat tergantung pada kondisi alam yaitu pada kondisi musim yang ada, struktur tanah, dan sosial budaya petani itu sendiri. Faktor musim ini merupakan faktor yang sangat dominan sekali, karena musim sebagai dasar penilaian yang akan menentukan kapan saat kredit itu harus dicairkan dan kapan pembayaran kembali kredit itu harus dilakukan.

Sebelum merujuk pada penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan pendapat para ahli, terlebih dahulu harus diketahui mengenai dilema pembatasan sebutan mengenai kredit bermasalah itu sendiri. *Non Performing Loan* (NPL) sering disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah dan menjadi salah satu tolok ukur kesehatan bank.

Pengertian NPL sendiri berdasarkan makalah yang diterbitkan oleh www.gunadarma.ac.id adalah sebagai berikut:

“NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang)”.

Siamat (2004) menambahkan mengenai fakta yang ditimbulkan akibat nilai NPL yang rendah. Berikut pernyataan Siamat mengenai pengaruh NPL:

“Salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. NPL timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya”.

Akan tetapi menurut Retnadi (2002) dalam bukunya yang berjudul *Memilih Bank yang Sehat* mengatakan bahwa *statement* tentang angka NPL yang tinggi bagi bank komersial merupakan salah satu indikator untuk mengukur kestabilan kelangsungan hidup bank hanya berlaku pada bank dalam kondisi normal. Faktanya ini berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia industri perbankan cenderung bergerak secara tidak normal dengan ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu:

Pertama, segelintir bank-bank besar yang menguasai hampir 80% seluruh aset perbankan ternyata masih memiliki porsi obligasi rekapitalisasi yang lebih besar daripada porsi kredit dalam asetnya. Kedua, dengan nilai NPL tinggi seharusnya profitabilitasnya rendah. Di Indonesia teori ini berlaku sebaliknya. Ketiga, secara logika ketika nilai penyaluran kredit *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tinggi, maka NPL juga mengikuti dengan nilai yang tinggi. Akan tetapi di Indonesia ketika LDR rendah, NPL yang dimiliki justru tinggi. Sehingga dengan kondisi ini Retnadi mengusulkan agar melihat NPL dan LDR secara simultan untuk menguji apakah kredit bermasalah akan banyak mempengaruhi operasional bank.

Dari pengawalan tersebut, penyelesaian kredit bermasalah untuk kredit sektor pertanian sebenarnya sama saja dengan penyelesaian kredit bermasalah untuk kredit non pertanian. Berikut beberapa rencana strategi yang dapat dilakukan dalam menyelamatkan kredit bermasalah menurut Sutojo (1997):

- a. Memerhatikan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran jangka pendek penyelamatan kredit bermasalah adalah memperkuat posisi tawar menawar bank terhadap debitur. Sasaran jangka menengahnya, dalam batasan waktu

yang wajar bank mampu mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya dengan berbekal data dan informasi juga proyeksi arus kas selama masa penyelamatan.

- b. Strategi untuk mencapai sasaran. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu cara penerapan strategi harus fleksibel, monitoring yang berkelanjutan, dan semua rencana beserta strategi tersebut harus dituangkan dalam dokumen tertulis dan bila perlu dilegalisasikan didepan notaris.

Dalam upaya menyelamatkan kredit bermasalah juga dibutuhkan pembentukan organisasi pelaksanaan upaya penyelamatan, hal ini bisa diaplikasikan melalui pembentukan *account officer* dan satuan eksekutif sebagai pelaksana. Jenis organisasi mana yang harus dipilih disesuaikan dengan besar kecilnya bank, karena besar kecilnya bank menentukan banyak sedikitnya karyawan. Juga besar kecilnya, rumit tidaknya persoalan kredit bermasalah yang sedang dihadapi.

Mengenai pembentukan *account officer* sendiri, bank dapat memilih orang-orang (karyawannya) yang memiliki banyak pengetahuan tentang kredit bermasalah, debitur terkait dan usaha terkaitnya sendiri. Sedangkan mengenai pembentukan satuan eksekutif pelaksana penyelamat kredit bermasalah, menurut Bank Administration Institute, Rolling Meadows, Illionis, USA, 1992, Michael Groves FCA mengutarakan agar tim pelaksana tersebut memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kebijaksanaan pokok pemberian kredit sesuai bank pelaksana
- b. Kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat
- c. Kemampuan analisis yang tajam
- d. Kemampuan bernegosiasi

- e. Kemampuan berkomunikasi
- f. Pengalaman dibidang perkreditan
- g. Kemampuan manajemen

Selain itu juga diperlukan kemampuan wawasan hukum perdata dan peraturan perbankan. Karena tidak mungkin satu orang memiliki kualifikasi sebanyak ini maka bank dapat menerapkannya melalui pembentukan tim eksekutif tersebut.

Dalam strategi upaya penyelamatan kredit menurut Bank Indonesia yaitu bank pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertugas menyuys program penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Hal penting yang juga jangan sampai terlupakan dalam penyelamatan kredit bermasalah adalah pendekatan terhadap debitur. Dalam melakukan pertemuannya, petugas bank perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Persiapan yang matang, termasuk susunan acara pertemuan dan apa saja yang dibicarakan
- b. Minimal ada dua petugas bank yang salah satunya adalah *account officer* yang menangani kredit yang dibicarakan.
- c. Bersikap ramah tetapi tetap tegas
- d. Memberi kesempatan waktu yang cukup pada debitur untuk mengutarakan masalah dan pendapat sesuai dengan fakta yang ada sesuai dengan keyakinan mereka.
- e. Selama pertemuan, diusahakan agar debitur dapat mengumpulkan bahan masukan yang diperlukan untuk menangani upaya penyelamatan kredit sebanyak mungkin.
- f. Selama pertemuan, petugas bank harus mengutarakan secara tegas apa saja yang diinginkan bank untuk debitur lakukan guna memperlancar proses upaya penyelamatan kredit bermasalah dan kapan batas waktu penyelesaiannya.

- g. Segera setelah pertemuan berakhir, petugas bank mengirimkan surat resmi kepada debitur yang berisi persetujuan selama pertemuan.

Setelah membuat rencana strategi seperti tersebut diatas, Sutojo (1997) meneruskan kajiannya mengenai tiga hal konkrit dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah berdasarkan studi kasus yang umum dilakukan oleh bank-bank, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)
- b. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*)
- c. Reorganisasi dan rekapitalisasi (*reorganizartion and recapitalization*).

Bentuk penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha usaha terkait debitur dapat berupa:

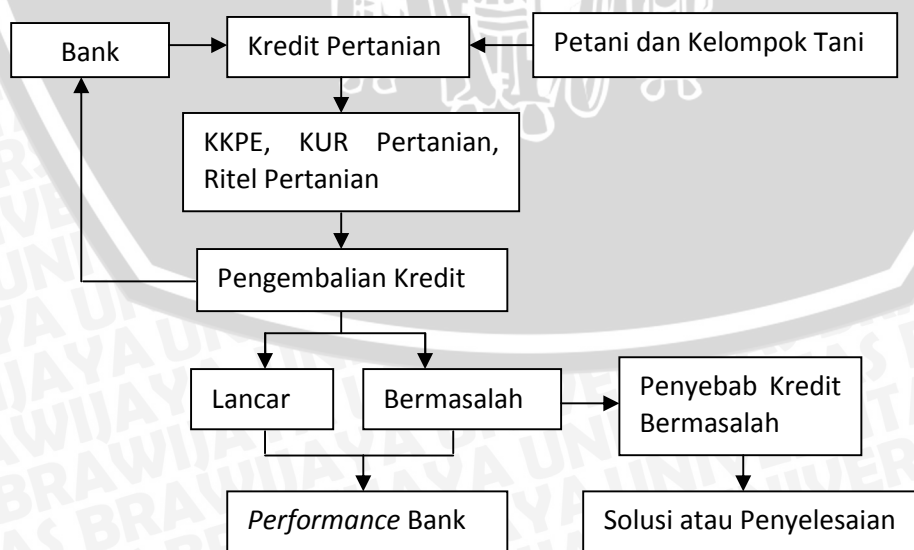
- (i) Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional untuk mencegah terjadinya pemborosan dana.
- (ii) Menekan jumlah biaya tetap.
- (iii) Menghapuskan atau mengurangi jenis usaha yang kurang menguntungkan.
- (iv) Konsolidasi bagian dan atau seksi usaha terkait yang ada.
- (v) Memangkas atau mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang tidak berguna atau tidak efisien.
- (vi) Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan jalan meminimalisasi jumlah persediaan yang diperlukan.
- (vii) Memperbaiki manajemen piutang dagang, antara lain dengan jalan lebih selektif dalam pemberian kredit penjualan kepada pelanggan dan meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang.
- (viii) Memangkas atau menghapuskan fasilitas produksi yang berbau "mercu suar" dan menjadi sumber pemborosan dana.

Dalam pasal 7.c Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank umum di Indonesia dapat melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara (untuk sementara waktu) mengkonversikan saldo kredit tertunggak menjadi penyertaan modal. Konversi kredit menjadi penyertaan modal itu harus sesuai ketentuan Bank Indonesia. Selain itu bank mempunyai kewajiban menarik kembali penyertaannya pada usaha terkait debitur.

2.8. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjabaran yang peneliti sampaikan pada bab pendahuluan dengan paduan referensi teoritis di atas dibutuhkan gambaran yang lebih mudah dimengerti untuk mewakili seluruh isi penelitian yang peneliti lakukan pada kesempatan ini. Sehingga melalui gambaran tersebut pembaca sudah mampu menangkap tujuan dan alur pemikiran dari penelitian yang ditulis. Maka dalam hal ini gambaran dari isi seluruh penelitian ini peneliti wujudkan melalui *flowchart* kerangka pikir sederhana yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3: **Flowchart Kerangka Pikir Penelitian**



Flowchart di atas menjelaskan bahwa pada penelitian ini peneliti fokus membahas kredit pertanian yang ada di BRI Cabang Sutoyo Malang dimana kredit pertanian tersebut meliputi kredit program KKPE, KUR pertanian dan kredit ritel pertanian.

Pada tiga program kredit pertanian tersebut sebagai wujud dari salah satu program kredit yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian ternyata mengalami masalah kelancaran pengembalian, baik itu yang berasal dari bunga kredit maupun angsuran pokok pinjaman. Mengingat sektor pertanian merupakan bentuk usaha bisnis yang rentan dengan istilah gagal panen (dikarenakan faktor alam dan kurangnya wawasan pengolahan pertanian berkelanjutan).

Berdasarkan prediksi tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apakah benar penyebab petani mengalami tunggakan angsuran adalah faktor ketidakpastian dalam usaha pertanian hingga menyebabkan munculnya kredit bermasalah bagi bank penyelenggara. Atau masih ada permasalahan-permasalahan lain yang menjadi penyebab kredit bermasalah didalam program kredit pertanian.

Selanjutnya, dari munculnya kasus kredit bermasalah tersebut, langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan kasus kredit bermasalah dan bagaimana pengaruhnya terhadap *performance* BRI Cabang Sutoyo Malang dalam usaha ekspansi bisnisnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Seperti yang sudah disinggung pada bab 1 bagian konteks penelitian, sudah banyak penelitian-penelitian pendahulu yang membahas tentang kredit pertanian. Akan tetapi dari sekian banyak penelitian tentang kredit pertanian masih jarang yang membahas kredit pertanian secara menyeluruh untuk semua program atau produk kredit pertanian yang diberikan oleh bank tertunjuk dalam penelitian. Terlebih lagi pada analisis seluruh program kredit pertanian yang berasal dari pemerintah. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya langsung memilih pada satu jenis kredit pertanian sekaligus memilih jenis pertanian apa yang akan diteliti.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas dinamika dalam pengembalian kredit pertanian. Karena pada dasarnya setiap program memiliki resiko. Pun demikian pada kredit pertanian yang sulit rasanya untuk benar-benar bebas resiko dalam hal dinamika pengembalian kreditnya. Fokus pembahasan kredit di sektor pertanian penulis pilih berdasarkan ketertarikan penulis pada kredit sektor pertanian yang hampir selalu menjadi trending topic karena berhubungan dengan pangan masyarakat. Selain itu, dalam kondisi serba ketidakpastian cuaca yang berdampak pada ketiadakpastian hasil panen kedepannya, membuat peneliti penasaran bagaimana BRI Cabang Sutoyo masih tetap bertahan dalam peran pemberian kredit pertanian di Malang. Fenomena ini tentu saja membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian bagaimana bank menstabilkan keuangannya.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur, berdiskusi atau melakukan wawancara dengan pihak perbankan, dan beberapa

orang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pembahasan membutuhkan penjelasan detail terkait dinamika dalam pengembalian kredit pertanian tersebut. Pada pendekatan kualitatif ini peneliti menggunakan metode empirik berbasis fenomenologis. Berdasarkan metode tersebut, peneliti akan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pihak bank, dan melakukan studi pada laporan kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan fenomena di lapangan.

Menurut Sugiyono (2011) penelitian itu digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Luthfiah (2010) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Oleh karena itu ketika orang memilih untuk melakukan penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk bertanya kepada responden, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BRI Cabang Sutoyo Malang pada bulan November 2013 dengan studi kasus objek penelitian adalah laporan kredit mulai tahun 2012 sampai 2013.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer penulis dapatkan dari laporan penyaluran kredit BRI Cabang Sutoyo Malang mulai tahun 2012 sampai 2013.

Pengertian data primer sendiri menurut Umi Narimawati (2008) adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam

bentuk kompilasi ataupun file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003) data primer biasanya diperoleh dengan survei lapang yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Secara kualitatif metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui dokumentasi karena data tersebut bersumber dari laporan kredit BRI Cabang Sutoyo Malang dan beberapa laporan lain tentang laporan kredit sektor pertanian. Metode pengumpulan data yang digunakan didalam penulisan ini adalah:

1. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur-literatur seperti buku-buku yang membahas mengenai kredit dan dinamika kredit, kredit bermasalah dan penyelesaiannya, BRI di awal abad milenium dan beberapa buku-buku tentang pertanian yang dapat menjadi acuan analisis pembahasan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan literatur dari internet seperti penelitian skripsi terdahulu mengenai kredit pertanian, jurnal-jurnal yang membahas tentang kredit pertanian dan artikel-artikel BRI beserta program kredit pertaniannya.

2. Dokumenter

Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan kredit yang diberikan BRI Cabang Sutoyo Malang, laporan-laporan penulisan sebelumnya, artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang

kesemuanya membahas mengenai perkembangan kredit pertanian secara menyeluruh sebagai pembanding dari kredit pertanian yang dijalankan BRI Cabang Sutoyo Malang. Hal ini akan bermanfaat untuk memperkaya wawasan penulis sehingga dalam menganalisis laporan kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang tidak terlalu berorientasi pada intuitif subjektif saja. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Menurut Moleong sebelum melakukan wawancara peneliti harus mencari tahu informan yang sesuai, kemudian membuat janji bertemu, dan bertemu langsung dengan informan. Sebelum bertemu dengan informan tersebut tentu saja peneliti harus melakukan persiapan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Yaitu AO program saudara Prasetiono, *Customer Service*, dan penanggung jawab marketing program pertanian Bapak Sony.

4. Intuitif Subjektif

Intuitif subjektif merupakan perlibatan pendapat penulis atas kondisi riil atau fenomena pengembalian kredit pertanian yang ada di BRI Cabang Sutoyo Malang. Baik itu kelancaran pembayaran maupun ketika terjadi kredit bermasalah (analisis kolektibilitas). Juga untuk penyelesaian dan pengaruhnya bagi BRI Cabang Sutoyo Malang itu sendiri.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani yang mengajukan kredit di BRI Cabang Sutoyo. Dari seluruh populasi yang ada tersebut dipilih

secara spesifik untuk petani yang mengajukan kredit pada sektor pertanian saja atau biasa disebut sebagai nasabah kredit pertanian. Adapun data yang penulis gunakan adalah laporan kredit pertanian mulai tahun 2012 sampai 2013.

3.6. Metode Analisis Data

Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada fokus penelitian dan pendekatan penulisan yang digunakan, penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Penerapan metode deskriptif tercermin dari penjelasan secara deskriptif dari angka dalam tabel-tabel laporan kredit, grafik pergerakan plafond kredit, grafik pengembalian kredit, dan posisi kolektibilitas kredit. Sedangkan untuk penerapan metode kualitatifnya tercermin dari pengungkapan makna dari deskripsi mengenai dinamika pengembalian kredit di BRI Cabang Sutoyo Malang sesuai dengan wawancara dengan informan. Pengungkapan makna ini akan diangkat berdasarkan teori mengenai kolektibilitas kredit dan *demand* kredit itu sendiri. Kemudian peneliti akan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu apakah ada sinkronisasi gejala atau tidak.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan sejumlah data yang diperoleh peneliti yang terekam baik dari hasil observasi atau dari sejumlah dokumen. Data di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang dimulai pada bulan November 2013 sampai bulan April 2013. Adapun informannya ialah AO program saudara Prasetiono, *Customer Service*, dan penanggung jawab *marketing* program pertanian Bapak Sony. Selain data-data yang di dapat dari informan, peneliti juga mendapatkan

informasi dari AO program komersial BRI sekitar Malang mengenai kredit program pertanian, profil petani di Malang melalui BPS Malang dan data penunjang lainnya.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Penerapan teknik reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan merangkum hasil wawancara dari informan yaitu AO program saudara Prasetiono, *Customer Service*, dan penanggung jawab marketing program pertanian Bapak Sony. Data yang telah direduksi oleh peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data (*data display*)

Pada tahapan ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data dapat dilakukan dengan memberikan uraian singkat. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Setelah melalui 3 tahapan di atas, dalam pemaparan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Bungin (2010) analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomenologisme yang sebenarnya lebih banyak alergi terhadap pendekatan positivisme yang dianggap terlalu kaku, hitam-putih, dan terlalu taat asas. Alasannya bahwa analisis fenomenologisme lebih tepat digunakan untuk mengurai persoalan subjek manusia yang umumnya tidak taat asas, berubah-ubah dan sebagainya.

Sedangkan fokus fenomenologi adalah pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Tujuan penelitian fenomenologikal adalah menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain (Salim, 2006).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat informasi dinamika kredit mealui pengalaman informan dalam mengurus kredit dan interaksi informan tersebut dengan nasabah maupun pihak bank. Disamping itu, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui peristiwa yang menyebabkan gejolak atas kolektibilitas kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang.

Pada tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan pemahaman terhadap penyajian data yang telah dihasilkan, peneliti berusaha untuk mencari makna data yang telah tergali untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul, kemudian dari data yang diperoleh tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan.

3.7. Uji Validitas Data

Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid artinya data yang dikumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan memang relevan dan mengandung informasi penting, maka menggunakan triangulasi. Triangulasi ialah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Jadi triangulasi merupakan cara

terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi ketika mengumpulkan data (Moleong, 2005).

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2011).

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Sedangkan triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu pengecekan data dengan menggunakan beberapa sumber informasi. Namun dalam proses penelitian yang telah dilakukan peneliti menggunakan tiga kombinasi triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

BAB IV

PEMBAHASAN

Kredit pertanian pada masa ini semakin sering menjadi *trending topic* dan memang sudah mulai banyak diteliti untuk mengetahui sejauh mana eksistensi kredit ini bisa berlangsung. BRI nasional pun juga sudah lama mengkaji dan terus mengembangkan program kredit pertanian ini dengan lebih baik dan lebih dekat dengan sasarannya. BRI Cabang Sutoyo pun juga mengembangkan program kredit untuk pertanian dan sudah stabil sejak tahun 2012.

Untuk mempermudah nasabah (petani) dalam menentukan pilihan dalam menggunakan program kredit pertanian dari BRI. BRI Cabang Sutoyo Malang memfokuskan programnya pada tiga macam jenis kredit yang melayani kebutuhan pertanian, yaitu yang pertama Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit pertanian Ritel. Adapun mengenai faktor pembeda antara fasilitas (apa saja yang dibiayai) dan syarat kredit yang diberikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Pada tabel di bawah ini dijelaskan bahwa KKPE yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian terlihat sangat memudahkan petani untuk mengikuti program ini. Demikian halnya dengan KUR yang terkenal cukup “memasyarakat” dikarenakan nasabah yang tidak *bankabel* pun dapat mengakses dan menikmati fasilitas kredit ini, dibandingkan ritel yang hanya dapat diakses oleh nasabah tertentu yang sudah *bankabel* dan berskala besar. Sehingga bantuan kredit yang dibutuhkan pun juga semakin besar. Tiga macam pilihan kredit ini peneliti yakini sudah mewakili kebutuhan masing-masing petani berdasarkan skala usaha yang dimiliki dalam mengelola dan mengembangkan pertaniannya. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai fasilitas dan syarat kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo.

Tabel 4.4: Perbedaan Syarat dan Fasilitas Kredit Pertanian berdasarkan Jenis Programnya di BRI Cabang Sutoyo Malang

	KKPE	KUR	Ritel
Ciri-ciri Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan melalui pembentukan kelompok tani dan ataupun kerjasama dengan koperasi. - Merupakan program pemerintah dengan bantuan subsidi. - Usaha tidak harus <i>bankabel</i>, <i>feasible</i> saja sudah cukup. - Membiayai bidang usaha tebu dan non tebu. - Agunan yang digunakan boleh tidak mengcover 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengajukan secara perorangan maupun kemitraan dengan usaha terkait. - Merupakan program pemerintah dengan bantuan subsidi. - Usaha tidak harus <i>bankabel</i>, <i>feasible</i> saja sudah cukup. - Membiayai semua bidang usaha. - Agunan yang digunakan boleh hanya mengcover 30% dari nilai kredit yang disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengajukan secara perorangan maupun kemitraan dengan usaha terkait. - Produk perbankan non subsidi pemerintah. - Usaha harus <i>feasible</i> dan <i>bankabel</i>. - Membiayai semua bidang usaha. - Agunan yang digunakan mengcover lebih dari 100% dari total kredit yang disepakati. - Membutuhkan tambahan agunan lain.
Fasilitas Umum dan Suku Bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal kredit per orang 100 juta. - Suku bunga 13% pertahun dengan subsidi: tebu disubsidi 5,5% oleh pemerintah. Non tebu disubsidi 7,5% dari pemerintah. - Ketika terjadi tunggakan setelah jatuh tempo angsuran pokok berakhir, maka suku bunga kembali pada nominal 13% (tanpa subsidi). - Pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan masa jatuh tempo kredit dan masa jatuh tempo bunganya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit yang diajukan maksimal bisa mencapai 500 juta. - Memiliki jaminan dari usaha terkait asuransi Jamkrindo dan Askrindo sebesar 70-80% dari total kredit yang disepakati. - Memiliki subsidi suku bunga dari pemerintah kurang dari 2% per bulan. - Suku bunga KUR mikro 1,02% per bulan (flat). Sedangkan KUR Ritel menggunakan suku bunga 13% per tahun (efektif). - Pembayaran bunga rutin dilakukan per bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit yang diberikan lebih dari 500 juta dan nominal tertinggi disesuaikan dengan nilai agunan yang diberikan juga kemampuan <i>cashflow</i> bank. - Suku bunga 13% per tahun. - Pembayaran bunga rutin dilakukan per bulan.
Jangka Waktu	Musiman.	Musiman dan ataupun 1 tahun.	Tahunan (1 tahun).

Sumber: Hasil wawancara dengan AO Program

Berikut merupakan data kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang:

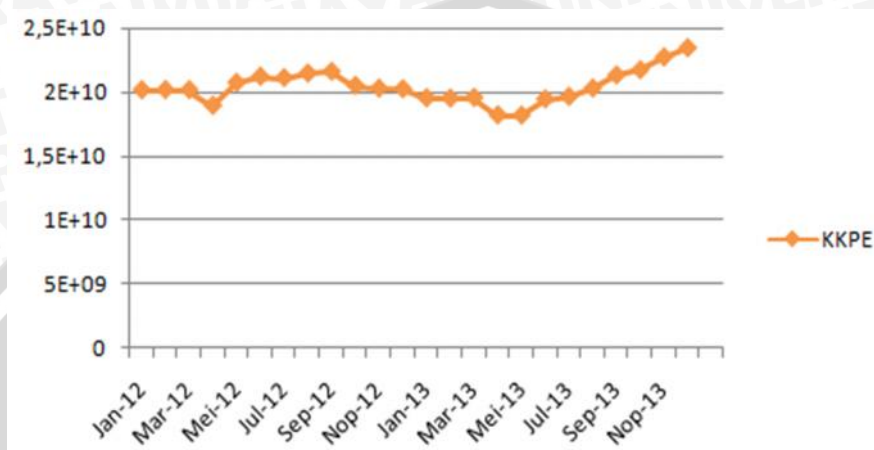
Tabel 4.5: **Plafond KKPE, KUR, dan Ritel Pertanian Periode 2012-2013 di BRI Cabang Sutoyo Malang**

	KKPE	Nasabah	KUR	Nasabah	Ritel	Nasabah
Jan-12	20137735205	34	-	-	-	-
Feb-12	20145000000	34	-	-	-	-
Mar-12	20145000000	34	-	-	-	-
Apr-12	18924089042	34	-	-	-	-
Mei-12	20702999909	79	-	-	-	-
Jun-12	21184884500	82	-	-	-	-
Jul-12	21076058885	99	-	-	-	-
Agst-12	21430050135	110	-	-	-	-
Sep-12	21565350135	112	-	-	-	-
Okt-12	20476475442	118	-	-	-	-
Nop-12	20254141290	118	99995444	1	-	-
Des-12	20211648790	122	289903030	2	-	-
Jan-13	19514132161	122	286703857	2	-	-
Feb-13	19484196680	122	283677910	2	950000000	1
Mar-13	19543331611	125	340648678	3	960489041	1
Apr-13	18178255894	125	485552693	4	970751801	1
Mei-13	18164362560	127	630943966	5	2904020981	4
Jun-13	19424034012	129	626537529	5	2940378689	4
Jul-13	19612254069	127	624416830	5	2938911825	4
Agst-13	20266386215	126	610012718	5	2935396787	4
Sep-13	21287068148	130	609876436	5	2934404874	4
Okt-13	21691890241	131	604856837	5	2844315960	4
Nop-13	22682730107	134	576498406	5	2872596609	4
Des-13	23400147900	136	574303818	5	2784135892	4
Total	Rp 489.502.222.931	2510	Rp 6.643.928.152	54	Rp 26.035.402.459	35

Sumber: Laporan Pengalokasian Kredit Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan pengubahan)

Berikut grafik mengenai *trend* eksistensi kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang berdasarkan interpretasi dari tabel di atas:

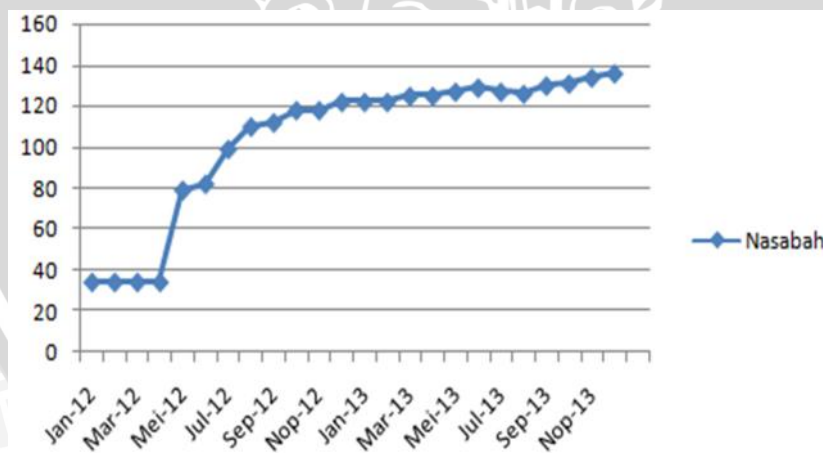
Gambar 4.4: **Grafik KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013 (data diolah)

Dan berikut grafik perkembangan nasabah untuk KKPE BRI Cabang Sutoyo:

Gambar 4.5: **Grafik Nasabah KKPE Periode 2012-2013**



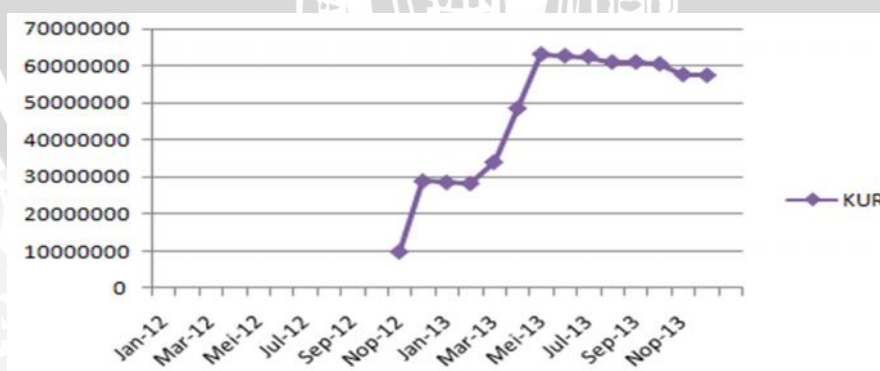
Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013 (data diolah)

Berdasarkan grafik KKPE di atas, terlihat bahwa ada kecenderungan nominal yang stabil bagi pencairan kredit yang diberikan, tetapi cenderung meningkat di

tahun 2013. Sedangkan untuk nasabah sangat jelas terlihat bahwa jumlah nasabah yang tergabung dalam KKPE cenderung meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa KKPE semakin diminati masyarakat karena begitu banyak manfaat dan kemudahan yang didapatkan debitur (lihat tabel 4.4). Sedangkan dari sisi perbankan karena ini cenderung stabil maka asumsi awal yang dapat peneliti berikan adalah sistem perkreditannya sudah baik sehingga tidak banyak terjadi masalah dalam aplikasinya.

Sedangkan mengenai program KUR, terjadi kecenderungan kenaikan pada nominal pemberian kredit untuk KUR dibidang pertanian. Demikian halnya pada kuantitas nasabah. Setelah bulan Februari 2013, terjadi kenaikan yang melonjak pada jumlah nasabah yang tergabung di program KUR pertanian. Ketika kenaikan nasabah terlihat sangat drastis bank biasanya juga menambah plafon kredit untuk memaksimalkan *profit orientednya* selama nilai kredit tersebut masih berada pada titik dimana likuiditas bank tidak terganggu. Berikut grafik yang menjelaskan mengenai kredit pertanian KUR.

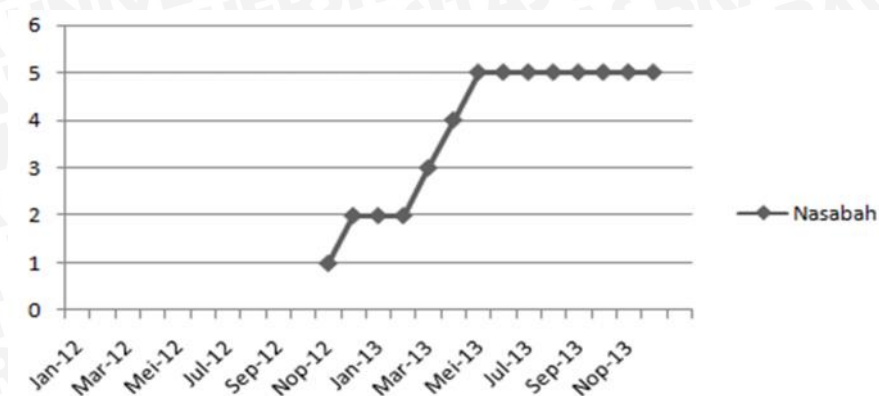
Gambar 4.6: **Grafik KUR Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun, 2013 (data diolah)

Berikut gambar grafik nasabah untuk KUR pertanian BRI Cabang Sutoyo:

Gambar 4.7: **Grafik Nasabah KUR Pertanian Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun, 2013 (data diolah)

Kenaikan seperti ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah yang sudah tergabung dan mengikuti program kredit di BRI Cabang Sutoyo Malang memang cenderung merasa puas baik itu dari segi pelayanan maupun kemudahan yang diperoleh dari adanya program KUR. Kepuasan tersebut kemudian mampu meningkatkan kepercayaan mereka untuk melanjutkan kreditnya dan ataupun membuat pengajuan kredit baru untuk usaha yang lain.

Adapun untuk program kredit pertanian yang ketiga, yaitu Ritel, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

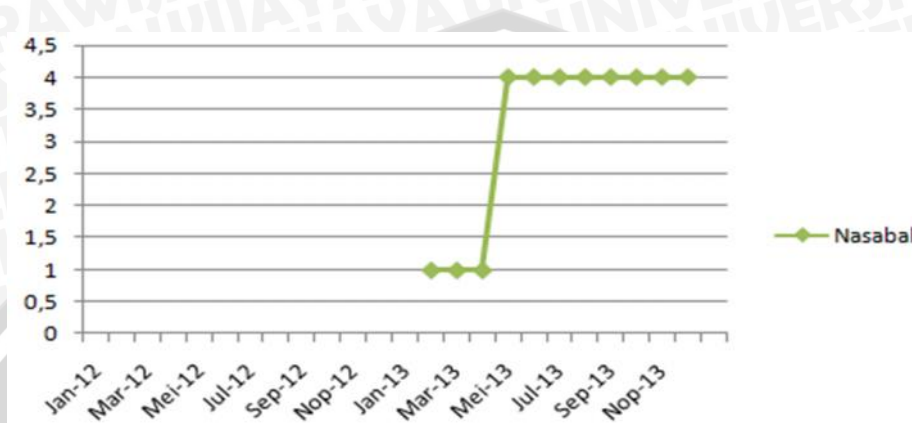
Gambar 4.8: **Grafik Ritel Pertanian BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun, 2013 (data diolah)

Berikut gambar grafik perkembangan nasabah Ritel pertanian BRI Cabang Sutoyo:

Gambar 4.9: **Grafik Nasabah Ritel Pertanian Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang Tahun 2012-2013 (data diolah)

Berdasarkan pergerakan grafik di atas, terlihat ada kenaikan alokasi kredit pertanian ritel yang cukup tajam setelah bulan Maret 2013 dan selanjutnya bergerak dengan nominal yang stabil walaupun sempat mengalami sedikit penurunan pada akhir tahun 2013. Demikian halnya dengan nasabah debitur ritel pertanian, terjadi kenaikan yang signifikan untuk nasabah setelah bulan Maret 2013 dan selanjutnya bergerak secara stabil.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari enam macam grafik dalam tiga macam program kredit pertanian yang diselenggarakan oleh BRI Cabang Sutoyo Malang adalah rata-rata terjadi kenaikan penyaluran kredit untuk sektor pertanian (KKPE, KUR pertanian dan Ritel pertanian). Jumlah nasabah yang menjadi debitur dalam program ini pun juga cenderung meningkat. Kecenderungan kenaikan pada alokasi kredit maupun jumlah nasabah kredit pertanian disebabkan karena pelayanan yang bersahabat dari BRI Cabang Sutoyo Malang baik dari hubungan personal antara *officer* dan debitur maupun dari model

skema kredit, tata cara pembayaran angsuran dan suku bunga yang ditawarkan. Kemudahan-kemudahan ini tentu saja akan menjadi nilai *plus* tersendiri bagi nasabah dan calon nasabah. Dampak dari kenaikan nasabah tersebut juga disebabkan oleh plafon kredit yang meningkat sebagai akibat dari kenaikan permintaan terhadap kredit pertanian.

Kendatipun demikian, bisnis perkreditan BRI Cabang Sutoyo Malang tidaklah bebas dari resiko. Masalah yang muncul pun sebenarnya juga bukan masalah baru bagi pihak bank, melainkan masalah sama yang terjadi secara berulang. Masalah yang berhubungan dengan kredit adalah tingkat kolektibilitas dari pengembalian kredit itu sendiri. Sehingga perlu adanya inovasi skema dan syarat kredit atau restrukturisasi penanganan. Kredit bermasalah yang masih juga terjadi pada produk kredit perbankan, jika tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan kerugian besar bagi bisnis perbankan.

Sesuai dengan teori perkreditan tentang kolektibilitas kredit yang membagi golongan nasabah dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban kreditnya, maka perilaku nasabah tersebut terbagi dalam beberapa golongan seperti yang telah dibahas dibagian landasan teori, yaitu:

- a. Lancar (*pass*) yang disimbolkan dengan L
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yang disimbolkan dengan DPK
- c. Kurang lancar (*substandard*) yang disimbolkan dengan KL
- d. Diragukan (*doubtfull*) yang disimbolkan dengan D
- e. Macet (*loss*) yang disimbolkan dengan M

Dari titik awal, yaitu lancar ketika nasabah tidak melanggar sama sekali ketentuan pembayaran angsuran dan bunga dari bank, telat membayar tiga bulan masuk DPK, apabila dalam posisi DPK masih terjadi telat tiga bulan dalam pembayaran maka beralih masuk ke KL. Sedangkan dari KL jika masih telat sampai satu bulan untuk membayar maka beralih ke D, sampai pada level

pelanggaran kredit macet apabila dalam posisi D masih telat membayar sampai dua bulan. Berikut contoh kasusnya.

Seorang debitur atas nama Melati (bukan nama sebenarnya) memiliki kredit KUR sebesar Rp 100.000.000,00 dengan metode pembayaran CO Tetap. Sistem pembayaran CO Tetap dibayar setahun sekali untuk angsuran pokok, sehingga Melati memiliki waktu 1 tahun untuk melunasi kreditnya (membayar pokok) dengan sistem pembayaran bunga per bulan (flat). Bunga yang harus dibayar Melati adalah 1,02% per bulan. Pada jatuh tempo angsuran pertama yaitu tanggal 1 Februari, Melati lupa membayar. Kelalaian itu terjadi hingga masa 3 bulan berjalan yaitu sampai tanggal 1 Mei. Maka kredit Melati telah masuk DPK. Kemudian di bulan Mei ternyata usaha Melati mengalami kerugian besar dan dia bahkan tidak mampu membayar bunga sampai pada bulan Mei. Maka kredit Melati telah masuk pada KL. Kemudian ketika dalam jarak 1 bulan setelahnya yaitu bulan Juni tidak ada pembayaran bunga maka kredit Melati masuk pada D (diragukan). Jika ada pembayaran untuk hutang-hutang bunga sampai bulan Juni maka kredit tersebut akan kembali pada posisi lancar. Akan tetapi jika tetap tidak ada pembayaran setelah 2 bulan setelahnya maka kredit Melati akan menjadi kredit yang macet.

Untuk mengantisipasi biaya-biaya ketika terjadi kredit bermasalah bank memberikan kebijakan untuk setiap kredit harus membayar nilai PPAP. PPAP merupakan anggaran khusus yang diberlakukan bank untuk masing-masing kredit yang diberikan. Anggaran ini dibayar oleh debitur sebagai dana jaminan antisipasi apabila debitur mengalami masalah pembayaran. Masing-masing kolektibilitas memiliki nilai cadangan atau PPAP yang berbeda-beda. PPAP digunakan ketika kredit terkait mengalami kasus kredit bermasalah. Besaran-besaran PPAP untuk masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- a. Kolek lancar (L) nilai PPAPnya 1%
- b. DPK nilai PPAPnya 5%
- c. Kolektibilitas kurang lancar (KL) nilai PPAPnya 20%
- d. Kolektibilitas diragukan (D) nilai PPAPnya 50%
- e. Kredit macet (M) langsung dihitung berdasarkan besar agunan.

Melihat keterangan tentang kolektibilitas di atas, maka kredit bermasalah merupakan awal mula terjadinya kredit macet. Dan kasus kredit bermasalah untuk sektor pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang pada intinya terjadi karena resiko bisnis dan non bisnis. Lebih jelasnya akan dibahas pada poin dibawah ini.

4.1. Dinamika Pengembalian Kredit Pertanian, Kolektibilitas, dan Faktor-Faktor Penyebab Kredit Pertanian Terjerat Kredit Bermasalah di BRI Cabang Sutoyo Malang

Untuk membahas faktor-faktor penyebab kredit pertanian bermasalah, peneliti akan menyajikan pembahasan per produk kreditnya supaya lebih mudah dipahami karena dari masing-masing produk dan ataupun program kredit memiliki karakter kredit dan persyaratan yang berbeda sehingga sumber masalah yang ditimbulkan pun juga berbeda. Lebih detailnya akan dijelaskan sebagai berikut (per program kredit).

a. KKPE

KKPE yang merupakan program kredit pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional ini juga merupakan kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan energi yang diberikan oleh BRI kepada petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan dengan suku bunga bersubsidi. Jenis KKPE yang diberikan oleh BRI Sutoyo adalah hanya

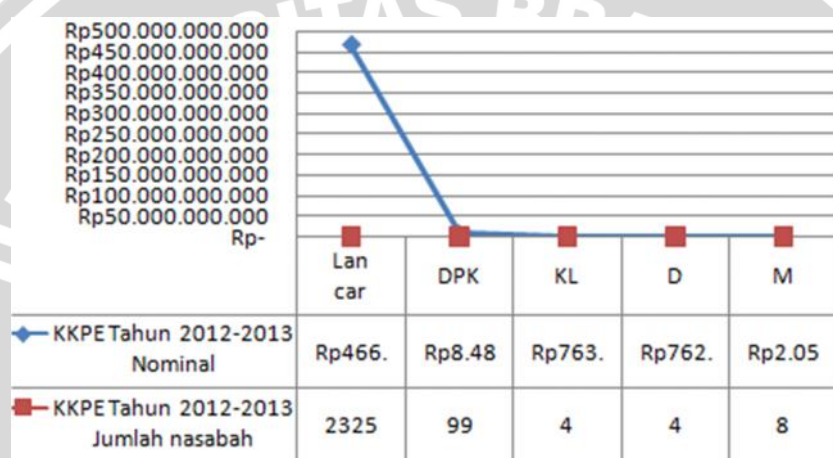
untuk petani yang mengajukan kredit secara berkelompok (tidak menerima pengajuan secara individu).

KKPE di BRI terbagi menjadi dua program yaitu KKPE tebu dan non tebu. Keduanya memiliki nominal suku bunga dan subsidi yang berbeda. Untuk KKPE non tebu subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 7,5% dari nilai suku bunga 13% per tahun yang ditentukan bank. Sehingga debitur hanya dibebani suku bunga sebesar 5,5% dari nilai pinjaman yang diajukan. Sedangkan untuk tebu berlaku sebaliknya. Bunga sebesar 7,5% dibebankan pada debitur dan sisanya disubsidi pemerintah. Adapun mengenai pembayaran atau pemberian subsidi dari pemerintah dicairkan selama 2 kali per tahun dan langsung diberikan pada bank penyelenggara program KKPE. Berikut grafik gambaran umum angsuran KKPE di BRI Cabang Sutoyo Malang.

Pada program KKPE pada dasarnya tidak ada masalah yang besar yang berhubungan dengan kredit bermasalah maupun yang sampai masuk kategori kredit macet dikarenakan bantuan subsidi yang besar dari pemerintah. Akan tetapi pada tahun 2013 tepatnya dimulai pada bulan Juni (lihat tabel tentang KKPE) mengalami masalah sebesar Rp 88.167.336 akan tetapi masih masuk kategori aman yaitu kolek lancar (L). Berturut-turut menular pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli yang sudah beralih pada kategori kredit diragukan (D) sebesar Rp 87.437.336. Pada bulan Agustus kembali ke KL sebesar Rp 67.4960.959 dengan alasan dari nilai KL di bulan Juni telah terbayar akan tetapi belum lunas sesuai perjanjian dan mengalami macet sebesar Rp 29.860.000. Sedangkan pada bulan September nilai KL yang ada pada bulan sebelumnya telah bergeser ditataran kredit diragukan (D) dikarenakan pada bulan tersebut debitur tidak membayar angsuran yang ditentukan. Selain itu ada nominal yang mengalami kemacetan (M) sebesar

Rp 29.810.000. Kemudian berturut-turut mulai bulan Oktober, Nopember, dan Desember mengalami masalah kredit macet (M) sebesar Rp 669.770.959, Rp 664.800.959, dan Rp 664.800.959. Terlihat ada penurunan nilai macet dari bulan Oktober ke Nopember, akan tetapi stagnan pada bulan berikutnya yaitu Desember.

Gambar 4.10: **Grafik Pembayaran Angsuran KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013**



Sumber: Laporan Pembayaran KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang (data diolah)

Kemacetan ini dikarenakan pada pertanian ladang di sekitar gunung Semeru yang sempat mengeluarkan abu panas sehingga mempengaruhi kesuburan tanaman disekitarnya. Lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan setelah tabel di bawah ini. Adapun kondisi macet dengan nominal sama yaitu yang terjadi pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember sebesar Rp 664.800.959, dikarenakan kelompok debitur sama lah yang mengalami kemacetan tersebut. Artinya, bahkan sampai bulan Desember kelompok tersebut (sebanyak 2 kelompok) belum berhasil menyelesaikan kewajibannya terhadap bank. Ketika program KKPE

mengalami kredit macet seperti yang terjadi pada nasabah di atas maka bunga yang harus mereka tanggung adalah 13% (tanpa subsidi).

Pada tabel berikut ini, dijelaskan bahwa karena selama dua tahun yang memiliki kasus kredit bermasalah hanya pada tahun 2013 saja, maka detail laporan angsuran KKPE yang bermasalah juga otomatis hanya dicantumkan pada tahun dimana masalah itu muncul. Berikut tabel yang menyajikan laporan KKPE. Berikut tabel mengenai kredit bermasalah KKPE menunjukkan jumlah debitur (kelompok tani) yang mengalami masalah pembayaran.

Tabel 4.6: **Nilai NPL KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang Periode 2012-2013.**

NPL KKPE selama 2 tahun		
NPL 2012	NPL 2013	Bulan dlm 1 thn
0.00%	0,00%	Jan
0.00%	0,00%	Feb
0.00%	0,00%	Mar
0.00%	0,00%	Apr
0.00%	0,00%	Mei
0.00%	0,45%	Jun
0.00%	0,45%	Jul
0.00%	3,48%	Agust
0.00%	3,31%	Sept
0.00%	3,09%	Okt
0.00%	2,93%	Nop
0.00%	2,84%	Des

Sumber: Laporan Pembayaran KKPE BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan pengubahan)

Dan berikut peneliti sajikan laporan angsuran KKPE yang bermasalah. Pada detail laporan angsuran KKPE dibawah ini tampak bahwa kredit bermasalah hanya muncul pada pertengahan tahun 2013, yaitu tepatnya mulai bulan Juni sampai Desember 2013. Sedangkan pada tahun sebelumnya KKPE terbebas dari kredit bermasalah dan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik.

Tabel 4.7: Laporan Angsuran KKPE Bermasalah

	KL	n	D	n	M	N	NPL	n	NPL (%)
Jan-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Feb-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Mar-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
April-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Mei-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jun-13	88167336	3	0	0	0	0	88167336	3	0,45%
Jul-13	0	0	87437336	3	0	0	87437336	3	0,45%
Agst-13	674960959	1	0	0	29860000	1	704820959	2	3,48%
Sept-13	0	0	674960959	1	29810000	1	704770959	2	3,31%
Okt-13	0	0	0	0	669770959	2	669770959	2	3,09%
Nop-13	0	0	0	0	664800959	2	664800959	2	2,93%
Des-13	0	0	0	0	664800959	2	664800959	2	2,84%
	Rp 763.128.295	4	Rp 762.398.295	4	Rp 2.059.042.877	8	Rp 3.584.569.467	16	16,55%

Sumber: Laporan Pembayaran Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan perubahan)

Alasan kenapa KKPE yang sudah mendapatkan banyak subsidi masih mengalami kemacetan di tahun 2013 adalah disebabkan oleh resiko bisnis dan non bisnis. Sesuai dengan teori resiko kredit di perbankan dimana resiko ini terbagi menjadi dua kategori yaitu resiko bisnis dan resiko non bisnis.

Resiko bisnis terdiri dari kegagalan usaha, kalah dalam persaingan karena kurang inovatifnya usaha yang dijalankan, faktor alam yang bisa menimbulkan kegagalan usaha dan sebagainya yang berhubungan dengan kurang atau ketidakberhasilan bisnis. Hal ini berdampak pada kemampuan

cashflow debitur yang terganggu. Dan tentu saja kepanjangan tangan dari itu akan bersambung pada kemampuan debitur melunasi kewajibannya pada kreditur (bank). Sedangkan resiko non bisnis merupakan masalah yang disebabkan oleh kelalaian AO kredit dalam memonitoring nasabah, kesengajaan debitur untuk tidak menunaikan kewajiban (karakter debitur untuk cenderung *breaking the law*) dan lain-lain.

Untuk masalah KKPE ini, kredit bermasalah bahkan sampai pada kategori macet disebabkan karena terjadinya resiko bisnis yaitu yang berasal dari faktor alam. Pada tahun 2013 kemarin aktivitas gunung Semeru yang lokasinya berada pada jarak lebih dari 20 km mengalami erupsi yang mengeluarkan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesuburan tanaman, bahkan cenderung mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan tanah pertanian. Kelompok-kelompok tani yang mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban pada bank mayoritas kelompok tani yang usaha pertaniannya (saat itu debitur sedang menanam cabe) terkena imbas asap vulkanik gunung Semeru.

Asap vulkanik yang menyembur ke ladang-ladang pertanian dan tanaman cabe debitur KKPE mengakibatkan cabe tersebut tidak bisa berproduksi dengan optimal. Ketika cabe tidak berproduksi optimal karena mengalami kerusakan sebagai akibat dari asap dan abu panas gunung Semeru, maka petani-petani tersebut tidak dapat menikmati hasil panen yang maksimal bahkan mengalami penurunan hasil panen. Disisi lain petani-petani itu pasti pernah memiliki utang atas biaya tanam yang dilakukan. Baik itu untuk pembelian pupuk, biaya perawatan maupun yang lain. Sehingga ketika hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan tagihan untuk kebutuhan yang lain seperti biaya hidup, biaya sekolah anak dan sebagainya sudah tidak mungkin dihindari tentu saja akan mempengaruhi

kemampuan *cash flow* petani-petani tersebut untuk menanggung semua kewajibannya.

Hasil pertanian cabe yang tidak sesuai berdampak pada penurunan hasil penjualan sebagai akibat dari penurunan hasil panen. Penurunan hasil penjualan menimbulkan penurunan *income* yang diterima petani. Secara analisis neraca keuangannya, ketika hasil penjualan dari pertanian berkurang dan tidak diikuti dengan pengurangan biaya-biaya, ditambah dengan beban utang belum terbayar dari produksi dan perawatan usaha, maka hal ini berdampak pada nilai pendapatan tunai dan modal yang akan diterima. Dari pendapatan tunai tersebut akan menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk segala bentuk kebutuhan yang harus disegerakan. Dari sini ketika nilai arus kas yang dimiliki tidak sesuai dengan segala kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi, maka tentu saja petani-petani tersebut akan kesulitan untuk membayar tagihan dari bank dikarenakan uang kas yang mereka miliki sudah digunakan untuk menutup defisit biaya pertanian dan kebutuhan hidup mendesak yang lain.

Selain itu, ada masalah lain yang mengakibatkan munculnya kemacetan pada program KKPE ini yaitu yang berasal dari resiko non bisnis. Masalah yang timbul dari resiko non bisnis menurut narasumber Prasetyono selaku AO Program di BRI Cabang Sutoyo Malang berasal dari diri beberapa debitur yang lupa atau memang sengaja tidak menunaikan kewajiban secara penuh. Permasalahan ini juga bersinergi dengan resiko bisnis yang dibahas pada paragraf sebelumnya yaitu akibat masalah kegagalan panen berdampak pada *cashflow* petani. Faktor pendukungnya adalah kesalahan monitoring dari AO kreditnya. Karena kelalaian baik dari pihak AO kredit maupun nasabah menimbulkan tidak disiplinnya dalam pemenuhan kewajiban pada bank.

Ketika *controlling* kurang ketat, yang biasa terjadi hasil usaha yang telah diperoleh tidak digunakan untuk membayar angsuran melainkan digunakan untuk keperluan yang lain. Hal ini karena ketidakmampuan untuk membayar kewajiban saat itu atau memang uang yang ada sedang digunakan untuk membeli barang konsumsi. Kedua kemungkinan ini sama-sama terjadi dan memang tidak bisa menyalahkan petani maupun bank secara khusus. Karena pada dasarnya sangat sulit memisahkan uang yang berasal dari pinjaman bank dengan uang hasil usaha pertaniannya sendiri ketika hasil usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan gagal.

Untuk tipe masalah yang sama, AO kredit yang juga sebagai *adviser* bagi nasabahnya sudah selayaknya meningkatkan monitor dan kreatif memberikan saran-saran kepada nasabah untuk terus meningkatkan kapasitas bisnisnya. Selain itu kehadiran AO sebagai *adviser* ini juga sangat dibutuhkan debitur mengenai edukasi bagaimana manajemen penggunaan dana untuk meminimalkan membeli barang-barang konsumsi yang bersifat tersier. Karena apabila peran ini tidak bisa berjalan maksimal pihak bank akan sangat sulit untuk mengontrol *cashflow* nasabah. Apakah benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang produktif atau justru sebaliknya. Manfaat yang akan diterima oleh bank ketika peran ini berjalan dengan baik adalah kelancaran proyeksi pendapatan bank itu sendiri yang dalam jangka panjang tentu saja berpengaruh pada modal dan kegiatan operasional lainnya.

Berdasarkan deskripsi dari dinamika program KKPE di atas, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini ditemukan hasil yang sinkron dengan penelitian terdahulu. Pertama mengenai penyaluran kredit. Secara teori penyaluran kredit hanya ada dua (seperti yang sudah

disebutkan pada bab 2 landasan teori) yaitu pola penyaluran *executing* atau *chanelling*. Karena KKPE ini merupakan program pemerintah maka KKPE disalurkan dengan cara *chanelling*. Alasan kenapa KKPE menggunakan *chanelling* adalah karena dalam prakteknya bank hanya menyalurkan kreditnya sesuai dengan standar dan aturan yang diberikan oleh pemerintah (lihat tabel 4.3). Selain itu bank juga tidak menanggung resiko penuh karena ada subsidi dari pemerintah.

Kedua, terkait penyebab kredit bermasalah secara teori seperti yang disebutkan oleh Tjiptoadinugroho (1994) bahwa sejatinya sebuah kredit dapat terjerus kasus kredit bermasalah atau kredit dengan kolektibilitas KL, D, dan M, disebabkan oleh tiga macam sumber yaitu: (i) faktor intern bank dan kreditur, (ii) ketidaklayakan debitur. Dan (iii) faktor-faktor ektern. Munzir (1996) juga mengatakan bahwa penyebab kredit bermasalah salah satunya adalah kegagalan usaha debitur. Dalam prakteknya, KKPE di BRI Cabang Sutoyo Malang (yang mengalami gejala kredit bermasalah diakhir tahun 2013) secara garis besar juga disebabkan oleh tiga faktor tersebut. Dan dari tiga faktor tersebut salah satunya yang paling banyak ditemukan adalah disebabkan oleh kegagalan usaha yang diakibatkan oleh faktor alam seperti yang telah dibahas sebelumnya,

Ketiga, mengenai kelancaran pengembalian kredit. Pada penelitian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pengembalian kredit dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan manajemen usaha, rentang waktu pembayaran kredit, rentang waktu pembayaran suku bunga, besar suku bunga, dan besar kredit yang diterima (Darussalam, 2013). Pada penelitian yang lain juga disebutkan ada pengaruh omzet usaha dan pinjaman lain dalam pengembalian kredit. Hal ini ditemukan pula pada KKPE. Kelancaran tersebut merupakan hal yang dapat dicapai karena rentang waktu

pembayaran pokok kredit kurang lebih 1 tahun. Sehingga ini merupakan waktu yang cukup lama bagi usaha pertanian. Kemudian yang kedua rentang waktu pembayaran suku bunga yang ditetapkan per bulan saja sehingga tidak terlalu memberatkan. Ketiga, tentang besar suku bunga dimana ini telah banyak mendapatkan subsidi lebih dari 50% dari pemerintah, serta besar kredit yang diterima proporsional dengan proyeksi *cashflow* debitur. Selain itu kelancaran ini juga telah dievaluasi karena dorongan kelancaran usaha debitur dan nilai pinjaman lain yang masih dapat dicover dengan pendapatan debitur itu sendiri.

b. Ritel Pertanian

Program kredit pertanian kedua yang dimiliki oleh BRI Cabang Sutoyo Malang adalah Ritel pertanian. Seperti bank-bank yang lain program kredit ritel pertanian ini diselenggarakan berdasarkan analisis pola perilaku bisnis. Pada umumnya jatuh tempo angsuran pokok adalah satu tahun atau bahkan lebih dari itu. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan di program ritel pertanian dipengaruhi oleh bentuk dan jenis usaha pertanian berdasarkan proyeksi musim panennya.

Merujuk pada teori mengenai klasifikasi kredit berdasarkan sifat penggunaan dana yang terbagi menjadi dua kategori yaitu *revolving* (berulang) atau pinjaman rekening koran dan *non revolving* (tidak berulang) atau persekot, maka melihat pola perilaku bisnis yang dibiayai oleh kredit ritel pertanian cenderung lebih pas jika menggunakan jatuh tempo kredit yang bersifat tahunan sebagai aplikasi dari penerapan prinsip *revolving max co* tetap yang artinya fasilitas kredit yang memberikan keleluasaan untuk menarik dan menyetor pinjamannya sesuai dengan kebutuhan selama jangka waktu kredit.

Selain itu sistem jatuh tempo kredit secara tahunan ini juga didukung oleh ciri-ciri dan syarat nasabah untuk menjadi debitur ritel yaitu bentuk usaha yang *feasible* dan *bankabel* juga didukung oleh agunan yang mengcover lebih dari 100% dari total pinjaman yang diajukan. Dari pengertian *bankabel* saja sudah mencerminkan bahwa usaha tersebut sudah memiliki legalitas hukum negara dan bank (sesuai dengan kriteria legalitas yang ditentukan bank) bersangkutan.

Usaha pertanian *bankabel* juga merupakan usaha yang sudah memiliki struktur modal, *cashflow*, dan stabilitas profit usaha yang sudah tertata bagus. Dengan didukung karakter debitur yang baik (prospek dan kesadaran membayar kewajiban), maka kelancaran pengembalian dan kolektibilitas kredit pertanian skala ritel ini bisa terjadi. Berikut data pinjaman kredit Ritel pertanian (dimulai pada bulan Februari 2013) yang semua laporan pembayarannya masuk pada kolom L (lancar).

Tabel 4.8: Laporan Angsuran Kredit Ritel Pertanian

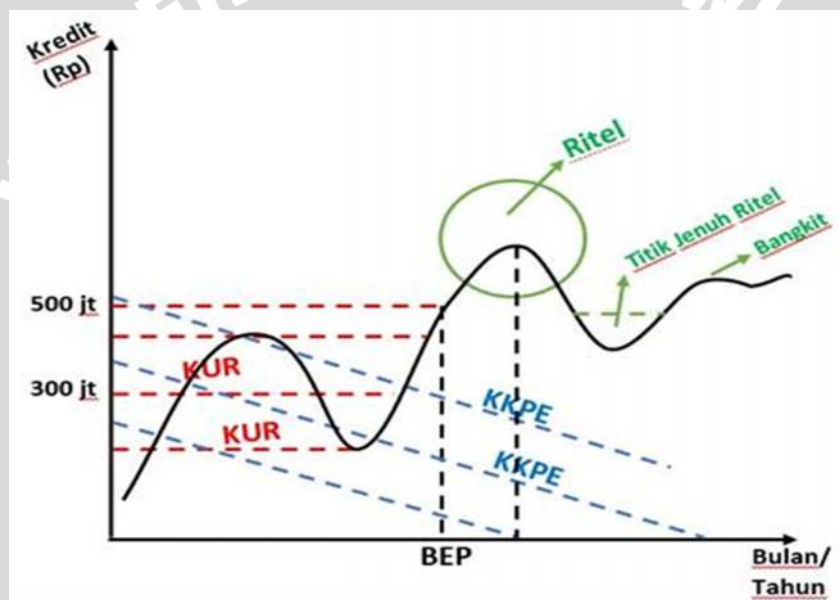
Bulan	L	Nasabah
Feb-13	950000000	1
Mar-13	960489041	1
Apr-13	970751801	1
Mei-13	2904020981	4
Jun-13	2940378689	4
Jul-13	2938911825	4
Agst-13	2935396787	4
Sep-13	2934404874	4
Okt-13	2844315960	4
Nop-13	2872596609	4
Des-13	2784135892	4
Total	26035402459	35

Sumber: Laporan Pembayaran Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan pengubahan)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada kredit ritel pertanian terbebas dari kasus kredit bermasalah.

Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan beberapa alasan kenapa kredit pertanian skala ritel ini bisa terbebas dari jeratan kasus kredit bermasalah. Akan tetapi hal dasar kenapa kolektibilitas lancar ini terjadi akan tercermin pada kurva dibawah ini:

Gambar 4.11: Kurva Posisi KUR, KKPE, dan Ritel Berdasarkan Kondisi Bisnis Debitur dan Skala Usaha



Sumber: Informan BRI

Keterangan:

Garis merah menunjukkan lokasi debitur dan skala usaha KUR

Garis biru menunjukkan lokasi debitur dan skala usaha KKPE

Warna hijau menunjukkan lokasi debitur dan skala usaha Ritel

Berdasarkan kurva diatas, terlihat jelas dimana posisi masing-masing jenis kredit. KUR yang posisinya memang di area merah mengindikasikan bahwa dalam program ini memang tidak harus untuk nasabah yang sudah mapan dan

bankabel, dari skala usaha pun walaupun baru *start up* sudah bisa dibiayai dengan kredit bank yang penting usaha tersebut masih *feasible*. Sehingga melihat gambaran usaha dan karakter debitur yang seperti ini wajar saja apabila kredit bermasalah sebenarnya cenderung terjadi pada program KUR. Sedangkan ritel, karena memang mereka adalah skala usaha yang memang sudah memiliki banyak lisensi dari negara. Terlihat pada gambaran di kurva yang berada di linkar hijau. Nilai pinjaman yang besar otomatis mendapatkan analisis yang jauh lebih mendalam dari bankernya. Kalaupun dalam posisi ini pada suatu masa tertentu mengalami titik jenuh maka nasabah ritel cenderung membuka bisnis baru untuk menghidupkan cabang lain dengan tujuan menutupi usaha yang sudah meredup juga supaya modal yang dimiliki terus berputar dan menghasilkan profit sehingga harus tetap produktif.

Berdasarkan deskripsi diatas, secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa di dalam kredit pertanian skala ritel memiliki kesamaan ciri dan sifat dengan penelitian sebelumnya mengenai nasabah, dan syarat kredit bank. Akan tetapi jika masuk pada ranah pengembalian dan kolektibilitas kredit terjadi perbedaan. Pertama, dimanapun program kredit ritel ini diberikan, masih sering terjadi kemacetan walau sedikit. Sehingga ketika dalam program ini bersih dari kata macet bahkan tidak satupun yang masuk kategori kolek kurang lancar maka program kredit pertanian skala ritel di BRI Cabang Sutoyo Malang ini benar-benar menakjubkan.

c. KUR Pertanian

Program kredit pertanian ketiga BRI Cabang Sutoyo Malang adalah KUR. KUR sendiri sebenarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengangkat sektor-sektor kecil seperti pertanian yang tidak harus *bankabel*, UMKM, dan beberapa bisnis lain dalam skala usaha di

bawah retail. KUR di BRI Cabang Sutoyo Malang dijamin oleh dua usaha terkait asuransi yaitu Jamkrindo dan Askrindo dengan besar jaminan diberikan yaitu 70-80% dari total kredit yang disepakati.

KUR terbagi menjadi dua turunan program yaitu KUR mikro dan KUR ritel. Perbedaan antara keduanya adalah pada jumlah pinjaman yang diberikan. Untuk KUR mikro maksimal pinjaman yang diberikan hanya sebesar 20 juta dengan tanpa jaminan. Hanya saja karena ada beberapa yang mengalami penunggakan pelunasan pinjaman maka pemerintah memberikan otonomi kebijakan pada bank mengenai hak untuk mengambil jaminan. Ini pun hanya dengan nominal yang sangat kecil misalnya dengan agunan senilai 5 juta bisa mendapatkan kredit maksimal 20 juta. Sedangkan untuk KUR ritel di BRI Cabang Sutoyo Malang bisa memberikan akses pinjaman sampai 500 juta dengan nilai agunan yang hanya mengcover 30% dari total kredit yang diajukan. Persyaratannya yang penting bisnis tersebut *feasible*. Walaupun jaminannya kecil untuk pengajuan di program ini tetap masih bisa diproses.

Program kredit pertanian yang tergabung dalam produk kredit KUR dimulai pada bulan Nopember 2012 dan saat penelitian ini dibuat data diakhiri pada bulan Desember 2013. Berikut tabel yang menyajikan laporan kredit pertanian bermasalah dalam program KUR:

Tabel 4.9: **Laporan Angsuran Kredit Pertanian KUR Tahun 2012**

Bulan/tahun	L	Nasabah
Nop-12	99995444	1
Des-12	289903030	2
Total	389898474	3

Sumber: Laporan Pembayaran Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan pengubahan)

Berikut laporan lengkapnya untuk angsuran kredit pertanian yang masuk kategori KUR di BRI Cabang Sutoyo.

Tabel 4.10: Laporan Angsuran Kredit Pertanian KUR Tahun 2013

	L		DPK		KL		M		NPL		NPL(%)
Jan-13	286703857	2	-		-		-		-		-
Feb-13	283677910	2	-		-		-		-		-
Mar-13	240648678	2	100000000	1	-		-		-		-
Apr-13	485552693	4	-		-		-		-		-
Mei-13	530943966	4	100000000	1	-		-		-		-
Jun-13	571537629	4	54999900	1	-		-		-		-
Jul-13	452494323	4	171922507	1	-		-		-		-
Agst-13	461680252	4	148332466	1	-		-		-		-
Sep-13	461543970	4	148332466	1	-		-		-		-
Okt-13	197452584	2	407404253	3	-		-		-		-
Nop-13	334339911	3	98701029	1	143457466	1	-		-		-
Des-13	131024182	1	301462170	3	-		141817466	1	141817466	1	24.69%
Total	4437599955	36	1531154791	13	143457466	1	141817466	1	141817466	1	24.69%

Sumber: Laporan Pembayaran Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang (dengan pengubahan)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terjadi kemacetan di akhir tahun. Permasalahan yang menyebabkan macet pada kredit pertanian KUR mirip dengan penyebab macet di KKPE. Sedikit yang membedakan kalau di KKPE ada masalah yang berasal dari resiko bisnis yang diakibatkan oleh semburan abu vulkanik gunung Semeru, akan tetapi kalau di kredit pertanian KUR resiko bisnisnya memang berasal dari hasil panen yang sedikit (tidak optimal) sedangkan harga jualnya rendah. Karena kebetulan pada kredit

pertanian KUR ini banyak petani yang menanam tanaman dengan harga jual yang fluktuatif. Sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan *cashflow* debitur tersebut dalam membuat keputusan memenuhi kewajiban dulu kepada bank atau memenuhi kewajiban yang lain terlebih dahulu.

Melihat fakta bahwa pada dasarnya, semua daerah, dalam menjalankan usahanya petani pasti memiliki hutang untuk membiayai biaya produksi maupun pengelolaan pertaniannya. Hutang tersebut biasanya digunakan untuk pembelian pupuk, biaya perawatan maupun yang lain. Sehingga ketika hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan sedangkan tagihan untuk kebutuhan yang lain seperti biaya hidup, biaya sekolah anak dan sebagainya sudah tidak mungkin dihindari tentu saja akan mempengaruhi kemampuan *cashflow* petani-petani tersebut untuk menanggung semua kewajibannya.

Sama seperti penjelasan yang telah dijabarkan terkait gambaran awal penyebab kredit bermasalah di BRI Cabang Sutoyo mengenai resiko bisnis, berikut penjelasan lebih detailnya. Hasil pertanian yang tidak sesuai berdampak pada penurunan hasil penjualan sebagai akibat dari penurunan hasil panen. Penurunan hasil penjualan menimbulkan penurunan *income* yang diterima petani. Secara analisis neraca keuangannya, ketika hasil penjualan dari pertanian berkurang dan tidak diikuti dengan pengurangan biaya-biaya, ditambah dengan beban utang belum terbayar dari produksi dan perawatan usaha, maka hal ini berdampak pada nilai pendapatan tunai dan modal yang akan diterima.

Dari pendapatan tunai yang dimiliki, dana tersebut akan menjadi nilai kas yang siap dibelanjakan. Dari sini ketika nilai arus kas yang dimiliki tidak sesuai dengan segala kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi, maka tentu saja petani-petani tersebut akan kesulitan untuk membayar tagihan dari bank dikarenakan uang kas yang mereka miliki sudah digunakan untuk menutup defisit biaya pertanian dan kebutuhan hidup mendesak yang lain.

Masalah lain yang mengakibatkan munculnya kemacetan pada kredit pertanian yang *terinclude* dalam KUR ini, yaitu yang berasal dari resiko non bisnis. Masalah yang timbul dari resiko non bisnis menurut narasumber Prasetiono selaku AO Program di BRI Cabang Sutoyo Malang berasal dari diri beberapa debitur yang lupa atau memang sengaja tidak menunaikan kewajiban secara penuh. Permasalahan ini juga bersinergi dengan resiko bisnis yang dibahas pada paragraf sebelumnya yaitu akibat masalah kegagalan panen berdampak pada *cashflow* petani.

Faktor pendukung kredit bermasalah tersebut salah satunya kesalahan monitoring dari AO kreditnya. Karena kelalaian baik dari pihak AO kredit maupun nasabah menimbulkan tidak disiplinnya dalam pemenuhan kewajiban pada bank. Hasil usaha yang telah diperoleh tidak digunakan untuk membayar angsuran melainkan digunakan untuk keperluan yang lain. Baik karena ketidakmampuan untuk membayar kewajiban saat itu atau memang uang yang ada sedang digunakan untuk membeli barang konsumsi dan investasi. Biasanya ini terjadi karena pada saat debitur menerima pendapatan biasanya belum jatuh tempo pembayaran angsuran pokok sehingga uang yang mereka miliki mereka gunakan untuk mengembangkan usaha lagi. Hal ini juga terjadi di program kredit pertanian yang lain (tidak hanya KUR). Kemungkinan-kemungkinan ini sama-sama terjadi dan memang tidak bisa menyalahkan petani yang sudah melakukan ini. Karena pada dasarnya sangat sulit memisahkan uang yang berasal dari pinjaman bank dengan uang hasil usaha pertaniannya sendiri ketika hasil usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan gagal.

Faktor lain yang sangat penting untuk dievaluasi justru peran AO kreditnya. AO kredit yang juga sebagai *adviser* bagi nasabahnya sudah pasti jangan sampai “teledor” dalam memonitoring dan memotivasi debitur untuk

terus bangkit dari masalah bisnis yang dihadapinya. Selain itu kehadiran AO sebagai *adviser* ini juga sangat dibutuhkan debitur mengenai edukasi bagaimana manajemen penggunaan uang yang dimiliki agar tetap bisa memenuhi kewajibannya pada bank dan tidak memilih membeli barang-barang konsumsi pribadi yang bersifat tersier. Karena apabila peran ini tidak bisa berjalan maksimal pihak bank akan sangat sulit untuk mengontrol arah uang yang dipinjamkannya. Apakah benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang produktif atau justru sebaliknya. Manfaat yang akan diterima oleh bank ketika peran ini berjalan dengan baik adalah kelancaran proyeksi pendapatan bank itu sendiri yang dalam jangka panjang tentu saja berpengaruh pada modal dan kegiatan operasional bank.

Dari deskripsi mengenai program kredit pertanian KUR di atas, secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa pada aplikasi KUR di BRI Cabang Sutoyo Malang memiliki karakter dan hasil yang mirip dengan KKPE. Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pada dasarnya KUR pertanian memiliki kesamaan dalam hal kebermanfaatan KUR bagi sektor pertanian dan penyebab KUR pertanian terjerat masalah kolektibilitas kredit.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Agustina (2009), salah satu peneliti yang melakukan penelitian tentang KUR mengatakan bahwa KUR yang digunakan oleh masyarakat tidak semuanya berjalan mulus dalam hal pengembalian kredit. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat kelancaran pengembalian KUR adalah omzet usaha, jumlah pinjaman dan pinjaman lain. Pada KUR pertanian di BRI Cabang Sutoyo pun juga demikian, tingkat kelancaran pengembalian kredit dimana ini akan menentukan posisi kolektibilitas pinjaman dipengaruhi oleh besar usaha yang didapatkan debitur, hutang-hutang yang ditanggung mulai dari pra tanam sampai pasca panen juga beberapa pinjaman lain yang dilakukan petani ketika hasil usaha tidak sesuai

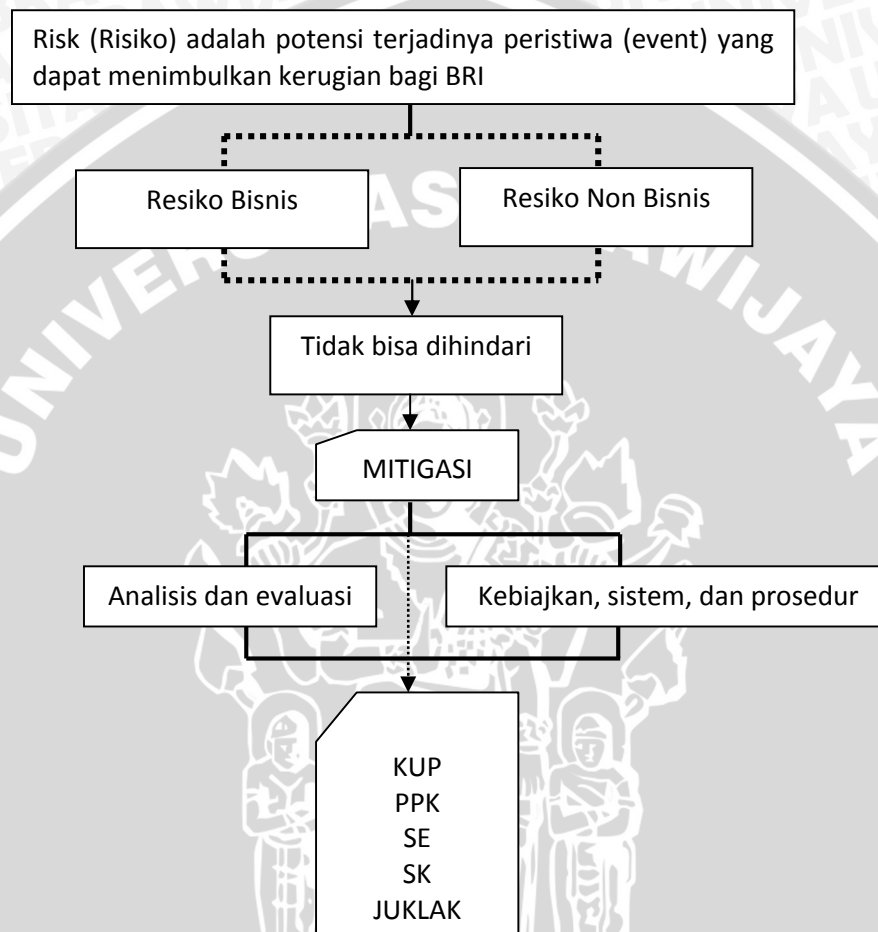
dengan yang diharapkan. Kesemua itu menjadi pengaruh kelancaran pengembalian kredit yang mereka ajukan. Dan faktor itu pula yang menjadi penyebab KUR pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang sempat memasuki masalah kolektibilitas.

Dari segi kebermanfaatannya, karena KUR merupakan jenis kredit yang berasal dari pemerintah dan memang diprogramkan untuk meningkatkan usaha masyarakat kecil, maka dengan kehadiran KUR di masyarakat telah membantu mereka dalam meningkatkan usaha. Contoh riilnya, ada kecenderungan kenaikan akses kredit pada KUR pertanian baik untuk jumlah nasabah maupun besar plafond kredit yang diterima debitur. Logikanya, ketika plafond kredit dinaikkan maka ada kenaikan *demand* kredit terhadap KUR pertanian. Bahkan di beberapa daerah debitur yang awalnya mengajukan KUR dengan tingkat pinjaman masih di level mikro, usaha menjadi berkembang dan kredit yang diajukan meningkat dan berubah ke ranah ritel sebagai akibat usaha yang berekspansi.

Berdasarkan pembahasan tiga jenis kredit pertanian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadinya kredit bermasalah tidak hanya disebabkan oleh masalah resiko bisnis (seperti kerugian dan ataupun kegagalan usaha) atau resiko non bisnis seperti kurangnya monitoring dan lemahnya kemampuan banker dalam menganalisis pemberian kredit, melainkan ada beberapa alasan yang bersumber dari syarat-syarat kredit yang kurang *bankabel*. Juga dari ketiga jenis kredit pertanian tersebut, secara rata-rata sinkron dengan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang penulis gunakan pada bab 2 walaupun ada satu jenis kredit (Ritel pertanian) yang dari sisi aplikasinya memiliki perbedaan karena kredit ini tidak mengalami masalah kolektibilitas sama sekali.

Sebuah resiko pengembalian kredit pada dasarnya tidak terjadi begitu saja, melainkan ada alur yang menjadi penyebabnya. Berikut alur resiko kredit yang sering terjadi dari masalah syarat kredit maupun skemanya.

Gambar 4.12: **Bagan Resiko Kredit**



Sumber: Pusdiklat BRI Jakarta, 2014.

Rasionalisasi awal membuat persyaratan yang mudah dan simpel tentu saja untuk memudahkan nasabah dan meningkatkan daya saing. Akan tetapi untuk beberapa persoalan ketika ada satu hal yang dimudahkan maka sektor yang lain harus ditingkatkan penjagaannya (monitoring).

Akhirnya, walaupun kredit bermasalah yang terjadi di BRI Cabang Sutoyo Malang tidak terlalu besar akan tetapi yang perlu ditekankan disini adalah

masalah yang muncul adalah masalah yang sama dan terjadi secara berulang. Sehingga peran AO harus benar-benar ditingkatkan lagi intensitasnya. AO bagi program kredit perbankan khususnya BRI Cabang Sutoyo Malang dengan sumber pendapatan utama yaitu 80% dari bunga kredit maka ini merupakan tantangan besar bagi AO kredit pada khususnya untuk benar-benar menjadi pelayan yang baik bagi nasabahnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan, AO bukan hanya penanggungjawab bidang melainkan juga “teman curhat” bagi nasabahnya. Saran-saran dan motivasi yang AO berikan sangat berpengaruh pada kondisi nasabahnya. AO juga harus cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan usaha nasabahnya. Manfaat yang dapat diambil selain untuk menjaga agar kredit tersebut tidak menjadi kredit bermasalah juga diharapkan kredit-kredit tersebut dapat dibawa ke ranah kredit ritel (jika jangkauannya masih di KUR maupun KKPE). Sehingga dampak jangka panjangnya juga pada proyeksi profit bank yang bersangkutan.

4.2. Pengaruh Adanya Kredit Pertanian bagi Pembangunan Pertanian di Bawah Naungan BRI Cabang Sutoyo Malang

Kredit pertanian yang telah dilaksanakan telah memberikan banyak manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat-manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani melainkan juga dirasakan oleh bank sebagai lembaga intermediasi pelaksana program, pemerintah selaku pemilik program juga perekonomian sebagai tolok ukur keberhasilan program. Berbicara mengenai keberhasilan, walaupun pasti memberikan manfaat akan tetapi program kredit pertanian di Malang belum mampu membawa tingkat pembangunan pertanian yang optimal.

Salah satu cara yang bisa digunakan sebagai pembuktian adalah masih adanya kredit pertanian yang macet di perbankan, walaupun tidak terlalu besar di

tahun 2012 dan 2013. Apabila melihat dari sumbangsih sektor pertanian terhadap PDRB Kota Malang terbukti masih sangat kecil. Walaupun ini masih dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, akan tetapi paling tidak karena kredit pertanian juga dijalankan oleh bank-bank maupun lembaga keuangan lain yang ada di Malang maka hasil dari kredit pertanian ini seharusnya bisa lebih berperan untuk meningkatkan PDRB Kota Malang. Faktanya sektor yang memberikan sumbangsih terbesar untuk PDRB Kota Malang adalah perdagangan, hotel dan restoran 38,66%. Disusul dengan industri pengolahan 33,14%, kemudian persewaan, kuangan dan jasa perusahaan sekitar 12.31%. Pertanian sendiri masih jauh untuk memberikan sumbangsih yang besar yaitu sebesar 0,3% (BPS Malang, 2013).

Walaupun demikian karena persentase macet yang ada di BRI Cabang Sutoyo Malang hanya sedikit, yaitu terjadi pada kredit pertanian skala non ritel maka dapat disimpulkan bahwa secara hitungan kasar, para petani yang menjadi nasabah di program kredit pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang memiliki tingkat perkembangan yang baik untuk usaha pertaniannya. Hal ini terlihat dari laporan angsuran debitur terhadap bank (lihat lampiran angsuran kredit pertanian).

Selain faktor karakter kedisiplinan dan kejujuran yang dapat dipercaya apabila rata-rata dari mereka mampu membayar sesuai dengan masa jatuh temponya, maka ini merupakan indikasi dari rata-rata bisnis pertanian yang dijalankan telah berkembang cukup mampu menstabilkan *cashflow* petani (walaupun kestabilan *cashflow* ini tidak berlaku bagi semua nasabah sepanjang waktu kredit dijalankan) sehingga mereka (para debitur) mampu melakukan pembayaran sesuai masa jatuh temponya. Akan tetapi ini masih belum cukup untuk memberikan pernyataan bahwa pertanian di Malang telah berkembang optimal dari adanya program kredit sektor pertanian. Kredit pertanian yang ada

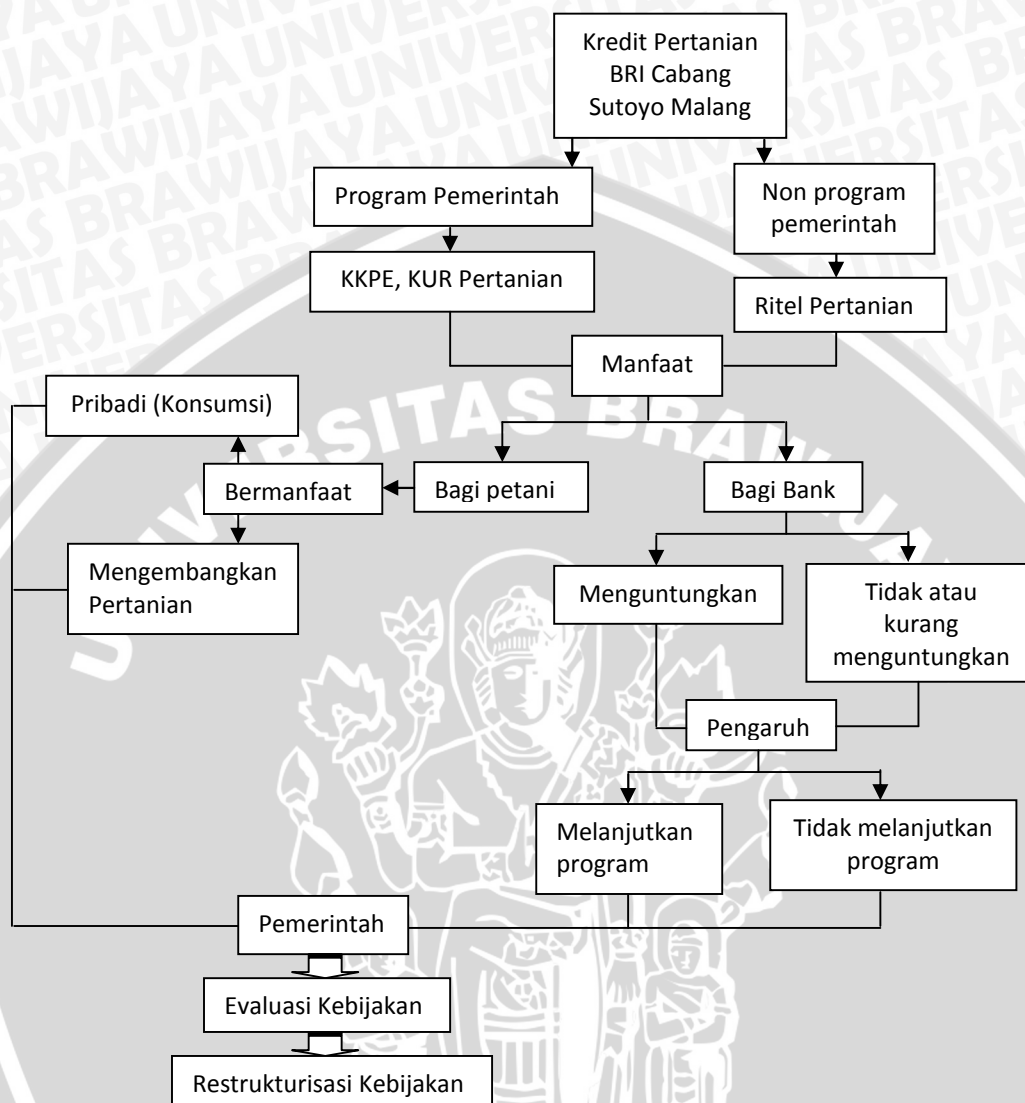
masih berada pada tahap mampu memberikan manfaat bagi perkembangan pertanian, akan tetapi belum mampu memberikan jaminan bahwa bekerja di sektor pertanian di Malang lebih menguntungkan dibandingkan sektor lain.

Walaupun demikian, paling tidak dengan tingkat kredibilitas yang baik dari debitur, maka dampaknya bagi bank dengan adanya kredit pertanian akan menguntungkan bank untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Sehingga selain memberikan manfaat bagi pertanian juga memberikan manfaat bagi bisnis bank di tahun 2012-2013. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk lingkup Malang saja, peran kredit pertanian masih sebatas pada mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan pertanian akan tetapi secara rata-rata belum masuk pada level mampu mensejahterakan petani dengan baik.

Dengan demikian kehadiran kredit pertanian di Malang membutuhkan pengkajian ulang dalam aplikasinya agar benefit yang ada tidak hanya dirasakan bagi segelintir pihak saja melainkan akan lebih banyak pihak atau pengguna yang merasakan manfaatnya. Sesuai dengan jenis-jenis kredit pertanian yang sudah disesuaikan dengan keragaman masyarakat di Malang diharapkan lebih seimbang dalam memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berikut akan digambarkan mengenai spesifik kredit pertanian dan manfaatnya untuk mempermudah pembaca memahami apa yang penulis sampaikan. Pada gambar di bawah ini nampak bahwa kredit pertanian terbagi menjadi dua, yaitu kredit pertanian yang murni produk bank (BRI Cabang Sutoyo Malang) dan kredit pertanian yang berasal dari program pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pertanian. Kredit pertanian yang murni merupakan produk BRI Cabang Sutoyo Malang adalah kredit ritel pertanian.

Gambar 4.13: Analisis Makro Dampak Kredit Pertanian



Produk kredit pertanian yang merupakan program pemerintah untuk dijalankan pihak intermediasi yang dalam hal ini (salah satunya) adalah BRI Cabang Sutoyo Malang dengan program KKPE dan KUR. Dari masing-masing program kredit tersebut memiliki dampak yang berbeda bagi bank maupun bagi petani selaku pengguna program. Lebih jelasnya akan dibahas pada poin-poin berikut ini. Lebih jelasnya akan digambarkan pada *flowchart* dibawah ini.

Dari gambar tersebut, dijelaskan bahwa ketika masalah terjadi maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan bahkan sampai pada titik restrukturisasi jika diperlukan. Lebih jelasnya akan dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

a. Bagi Petani

Bagi petani, dengan mereka mengajukan kredit untuk sektor pertanian yang sedang mereka kerjakan, ternyata ada dua sisi manfaat yang petani dan ataupun kelompok tani dapatkan. Pertama, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari narasumber AO program, dengan adanya program kredit pertanian, memang cukup membantu untuk mengembangkan pertanian di Malang. Buktinya dalam laporan penyaluran kredit yang diberikan oleh BRI Cabang Sutoyo Malang, ada 2399 debitur yang masuk pada kategori lancar dalam membayar angsuran. Artinya, ketika angsuran yang mereka lakukan selalu lancar maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan dampak dari *cashflow* keuangan usaha yang baik.

Cashflow yang baik berarti usaha yang mereka jalankan telah mampu memberikan profit yang dapat membantu memenuhi kebutuhan bahkan sampai peningkatan pemenuhan kebutuhan usaha. Sehingga dengan *cashflow* yang baik itu tadi, petani bisa lebih mengatur untuk penyisihan pendapatannya supaya dapat membayar cicilan dan ataupun melunasi pinjaman yang mereka lakukan pada bank. Walaupun manfaat ini belum optimal karena masih ada beberapa nasabah yang mengalami masalah *cashflow* dikarenakan adanya faktor resiko bisnis dan non bisnis yang tidak bisa dihindari. Seperti yang dibuktikan dengan 112 nasabah yang sempat mengalami DPK, 5 nasabah masuk kurang lancar, 5 nasabah masuk kolek diragukan, dan 8 nasabah mengalami kredit macet.

Kendati demikian, dengan adanya program kredit pertanian tersebut nyatanya tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan pertanian

saja melainkan juga untuk kepentingan pribadi debitur itu sendiri. Hal ini sinkron dengan masalah resiko non bisnis dan kelalaian AO program yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Petani-petani yang mengajukan kredit untuk usaha pertaniannya terkadang menggunakan dana pinjaman untuk membeli barang konsumsi, tambahan barang-barang investasi, biaya hidup dan sebagainya. Tentu saja fakta-fakta seperti ini merupakan hal yang sangat sulit dihindari mengingat *cashflow* petani yang tidak semuanya baik dan stabil. Sehingga untuk mengantisipasinya kembali pada peran AO program yang harus benar-benar cerdas membimbing dan mengarahkan nasabahnya.

b. Bagi Bank

Menurut informasi yang disajikan oleh kementerian pertanian pada buku laporan statistik makro pusat data dan sistem informasi pertanian, secara nasional pada tahun 2008-2012 sebesar 22,17% per tahun dengan posisi kredit tersebut merupakan kredit menengah kecil yang naik sebesar 16,97% per tahun dan investasi sebesar 21,85% per tahun.

Di BRI Cabang Sutoyo Malang, porsi kredit untuk sektor pertanian selama tahun 2012-2013 sebesar Rp 522.181.553.542 dengan perbandingan seluruh dana yang dikeluarkan untuk produk kredit lebih dari Rp 4.492.841.522.323. Berdasarkan data tersebut, pada *flowchart* telah digambarkan apakah kredit yang cukup besar untuk dialokasikan disektor pertanian ini benar-benar menguntungkan bagi bank? Atau hanya menguntungkan pada batas yang bersinergi pada ekspansi kredit saja? Karena bagaimanapun, bank sebagai lembaga *profit oriented* tentu akan menganalisis seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan karena hasil ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah bank

akan melanjutkan program atau tidak. Lebih detail mengenai interpretasi keuntungan per produk kredit dalam cakupan kredit pertanian akan peneliti jelaskan dibawah ini.

1. KKPE

Untuk KKPE, dengan besarnya subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah tentu saja akan sangat membantu bank dalam meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. hal ini dikarenakan tanggungan yang dibebankan pada debitur menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan program kredit pertanian yang lain. Dari analisis profit bank juga berada pada titik dimana mereka dapat mengambil profit normal layaknya produk kredit yang lain. Faktor pendukungnya adalah atas dasar skema kredit yang tidak ada pengecualian khusus dari pemerintah kecuali yang diberlakukan oleh pihak bank sendiri selaku pelaksana program. Sehingga dengan adanya program KKPE ini justru membantu bank khususnya BRI untuk lebih eksis meningkatkan *performance* usaha, profit, dan mengembangkan usahanya (ekspansi) pada lebih banyak sektor dengan dukungan yang baik dari pemerintah.

2. KUR Pertanian

Untuk program KUR, sesuai dengan spesifikasi yang sudah dibahas di bab IV, program ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mengangkat usaha rakyat salah satunya adalah pertanian, maka pemerintah juga memberikan subsidi untuk suku bunga KUR (walaupun bantuan subsidinya < 2% per bulan). Akan tetapi pemerintah juga memberikan jaminan yang menaungi program KUR yaitu melalui lembaga asuransi Askrindo dan Jamkrindo sebagai “payung” ketika terjadi kredit bermasalah pada program ini. Kemudian, mengenai sisi benefit bagi bank, menurut wawancara yang telah peneliti

lakukan, bagi BRI Cabang Sutoyo Malang keuntungan yang didapatkan masih berada pada garis normal seperti kredit yang lain walaupun KUR memiliki jaminan dari lembaga asuransi dan subsidi. Bahkan pihak bank sempat mengeluarkan *statement* bahwa KUR merupakan pinjaman politik.

Walaupun tujuan program ini sangat mulia, akan tetapi bagi bank, bank tetap melihat seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Dari fakta mengenai jaminan asuransi saja nyatanya bank masih tetap harus membayar ganti rugi ketika terjadi klaim untuk kredit bermasalah. Jadi jaminan tersebut sebenarnya hanya penutup sementara saja untuk memindahkan nominal-nominal kredit bermasalah pada penyertaan modal sementara bagi bank yang dananya masih tersendat. Setelah dana tersebut kembali bank harus membayar ganti sebesar klaim yang diajukan. Melihat fakta ini, dugaan peneliti seakan-akan tidak semua BRI sebenarnya menerima dan bersedia untuk memberikan KUR pada sektor-sektor yang rentan kasus kredit bermasalah. Sehingga untuk KUR sepertinya perlu peninjauan kembali mengenai syarat dan mekanisme kreditnya.

Jika ditataran nasional, KUR sudah sangat bermanfaat bagi pertanian juga benefit bagi bank penyelenggara sendiri. seperti pada data yang ditunjukkan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia edisi 12 September 2013, menginformasikan bahwa berkat KUR banyak UMKM yang mengalami kemajuan, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Sepanjang tahun 2011 sampai Mei 2013 realisasi KUR yang disalurkan BRI di Minahasa Utara sebesar Rp 43,57 miliar untuk 6.341 orang. Dari total KUR Rp 43,57 miliar tersebut sebanyak Rp 26,14 miliar atau 60% untuk membiayai sektor tambak ikan, Rp 13,07 miliar atau

30% untuk membiayai sektor pertanian, dan Rp 4,35 miliar atau 10% untuk membiayai perdagangan. Manfaat-manfaat ini juga dirasakan di kota-kota lain bahkan Jayapura sekalipun.

Para pelaku UMKM di Jayapura berhasil mengembangkan sayap usahanya ke sektor-sektor lain yakni membuka usaha rumah kontrakan, usaha jasa sewa ojek, dan lain sebagainya. Hal lainnya adalah para penerima KUR berhasil membiayai pendidikan anak-anaknya di perguruan tinggi. Sejak KUR diluncurkan tahun 2007 hingga Februari 2013 KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 103,203 triliun dengan jumlah nasabah 8,02 juta orang. Khusus tahun 2012 realisasi KUR mencapai Rp 34 triliun dari target senilai Rp 30 triliun.

Di Minahasa sejak KUR diluncurkan tahun 2007 hingga Juni 2013, KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 119,5 triliun dengan jumlah nasabah 8,9 juta orang. Khusus tahun 2012 realisasi KUR mencapai Rp 34 triliun dari target senilai Rp 30 triliun. Pun demikian di beberapa kota lain yang anggarannya juga dinaikkan (Rahman, 2013). Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa di tataran nasional ketika anggaran KUR dinaikkan maka sudah ada BRI-BRI penyelenggara KUR yang mampu meraih profit yang sangat baik sehingga mereka berani memperbesar penyaluran kredit untuk KUR.

Di BRI Cabang Sutoyo Malang (walaupun tidak menuntut kemungkinan masalah seperti ini juga terjadi di BRI yang berada di cabang-cabang lain dan tidak terdeteksi karena keterbatasan informasi peneliti) masih memerlukan restrukturisasi sistem untuk membuatnya lebih menguntungkan dengan tetap tidak mengabaikan benefit yang akan diterima nasabah untuk mengembangkan usahanya khususnya di penggarapan sektor pertanian.

3. Ritel Pertanian

Kredit ritel pertanian merupakan produk kredit untuk pertanian yang murni berasal dari bank BRI Cabang Sutoyo Malang. Pada program ini, berdasarkan data yang dilaporkan oleh pihak bank (lihat bab IV mengenai pembahasan ritel) yang memang tidak mengalami masalah dalam pengembalian pinjaman maka peneliti yakin bank sudah pasti akan melanjutkan program karena ketika program berjalan tanpa ada hambatan maka tingkat profitabilitas yang diharapkan pun juga stabil dan sesuai dengan yang diharapkan.

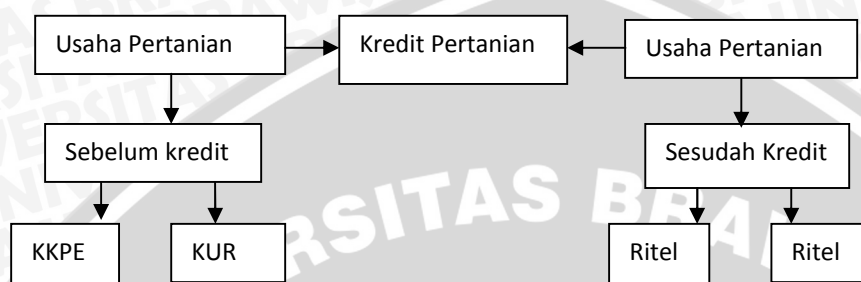
c. Bagi Pemerintah

Melihat pembahasan-pembahasan pada poin-poin diatas yang juga telah diringkas pada *flowchart*, maka untuk beberapa program kredit pemerintah yang rentan bermasalah dengan resiko-resiko bisnis maupun non bisnis perlu dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi mendalam pada setiap bank pelaksana program. Pengkajian ini meliputi evaluasi berulang terhadap sistem kredit yang diberlakukan, syarat dan mekanisme kredit, undang-undang pelindung dan perintahnya, pola perilaku bank pelaksana terhadap penyikapan program sampai pada restrukturisasi kebijakan berikutnya yang akan dikeluarkan demi tercapainya tujuan pemerintah untuk mengangkat sektor-sektor kecil dan menengah termasuk pertanian yang rentan dengan masalah gagal panen dengan tetap memberikan keuntungan optimal bagi semua pihak (objek dan pelaksana program).

Berdasarkan tiga pembahasan dari kebermanfaatan bagi ketiga belah pihak sebagaimana telah tersebut di atas maka gambaran dampak kredit pertanian terhadap pembangunan pertanian akan terlihat ideal ketika lebih dari 50% usaha pertanian debitur yang awalnya berada di ranah KKPE atau KUR

bisa berubah menjadi bisnis pertanian ritel. Berikut *flowchart* kondisi perkembangan pertanian paling ideal.

Gambar 4.14: **Bagan Dampak Kredit Pertanian Bagi Pembangunan Pertanian Secara Ideal**



Kondisi ideal tersebut tidak dialami semua debitur kredit pertanian di Malang. Hanya beberapa saja yang dapat mencapai perkembangan ideal tersebut. Melihat perkembangan ditahun 2014 tentang cita-cita terjadinya perkembangan ideal bagi semua debitur yang tergabung dalam kredit pertanian khususnya yang mengikuti KKPE dan KUR ternyata malah terjadi masalah di program KKPEnya.

Masalah KKPE (kredit bermasalah) yang terjadi di BRI pada tahun 2013 seakan merupakan tahun pembuka masalah bagi program tersebut. Berdasarkan informasi dari AO program KKPE pada *meeting* BRI bulan Mei awal kemarin, disampaikan bahwa mulai muncul keraguan dan ketakutan bagi AO program KKPE untuk terus berperan dalam melaksanakan program ini.

KKPE yang merupakan program pemerintah untuk mengangkat dan mengembangkan sektor pertanian memiliki sistem pengawasan yang ketat. Mengingat sumber dana yang digunakan berasal dari APBN. Bahkan pemantau audit keuangan untuk KKPE langsung dari KPK. Sehingga ketika ada masalah

dalam KKPE bank akan lebih khawatir jika berurusan dengan KPK. Saat ini isu terkini KKPE yang masih menjadi *privacy* bank adalah sebagai berikut:

- a. Terkait pembayaran bunga. Karena dana KKPE dicairkan melalui rekening kelompok dan ada salah satu dalam anggota kelompok belum menggunakan dana ia tetap dikenakan pembayaran bunga. Dalam kondisi ini bank tetap diuntungkan, tetapi petani yang belum memakai dananya merasa dirugikan.
- b. Dari sisi pencairan dananya. Dana KKPE hanya bisa diberikan pada pengaju yang memiliki KTP dengan keterangan jenis pekerjaan petani atau wiraswasta. Masalahnya orang yang dalam KTPnya memiliki keterangan jenis pekerjaan tersebut dan mengajukan dana di bank justru mayoritas buruh tani yang belum tentu memiliki lahan sendiri. Sehingga untuk analisis syarat kreditnya menjadi lebih sulit.
- c. Dobel pembiayaan. Maksudnya bagi keluarga misalnya suami-istri dengan jenis pekerjaan di KTP yang berbeda, dengan keterangan kepemilikan lahan yang sama tetapi mengajukan jenis kredit yang berbeda dengan KTP masing-masing maka ini mengakibatkan dobel pembiayaan dari bank. Dana yang seharusnya dapat digunakan lebih merata menjadi berpusat pada kelompok-kelompok tertentu saja.

Lebih jelas mengenai permasalahan terbaru dari program KKPE sulit untuk mendapatkan data lengkapnya dikarenakan isu yang masih sangat baru dan dibutuhkan waktu untuk melihat perkembangan masalah itu sendiri. Akankah BRI mampu mencari jawaban atas masalah KKPE di tahun ini atau akan ada kebijakan lain dari bank maupun pemerintah mengenai kelanjutan program KKPE pada tahun depan.

4.3. Informasi Tambahan (Kemampuan Akselerasi BRI)

BRI Cabang Sutoyo Malang yang merupakan bagian dari kesatuan BRI secara nasional dapat dibilang cukup sukses dalam usaha bisnis perbankannya. Tentu saja BRI Cabang Sutoyo ini juga menerapkan apa yang menjadi basis dasar rahasia sukses BRI secara nasional. Djoko Retnadi salah satu staff BRI yang sudah menjadi Staff Madya I/F1 dalam buku kumpulan tulisan tentang BRI yang berjudul Bank BRI Terbaik di Awal Milenium oleh Hasan dkk (2004) membagi rahasia sukses BRI sebagai berikut.

Jika dilihat dari kekuatan BRI saat ini, sedikitnya ada empat kunci sukses keberhasilan. Pertama, bisnis yang fokus. Sejak direkapitalisasi di tahun 2000, BRI telah menyusun rencana bisnis dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan layanan kekeluargaannya membuat BRI semakin dikenal “wong cilik” didaerah-daerah. Akhirnya BRI mengembangkan jumlah kantor BRI unit sebanyak 4000 kantor dan diperkenalkannya Kantor Cabang Pembantu (KCKP) maka jangkauan layanan BRI kepada UMKM dan “wong cilik” semakin sulit ditandingi oleh pesaing dikelasnya.

Kunci sukses kedua adalah kedisiplinan jajaran manajemen dalam menjalankan rencana bisnis. Faktor disiplin ini membuat BRI dapat menghindari godaan dari memasuki wilayah bisnis yang bukan menjadi kompetensinya. Meskipun saat ini BRI masih terlihat terus melakukan ekspansi untuk kredit besar, namun terbatas hanya untuk sektor agribisnis dan usaha terkait yang memiliki *linkage* program.

Kunci sukses ketiga adalah kejelian manajemen dalam memberikan insentif pada pekerja. Hal ini berdampak keberhasilan BRI melakukan IPO yang *oversubscribed* hingga 13,6 kali dan perolehan berbagai *award*

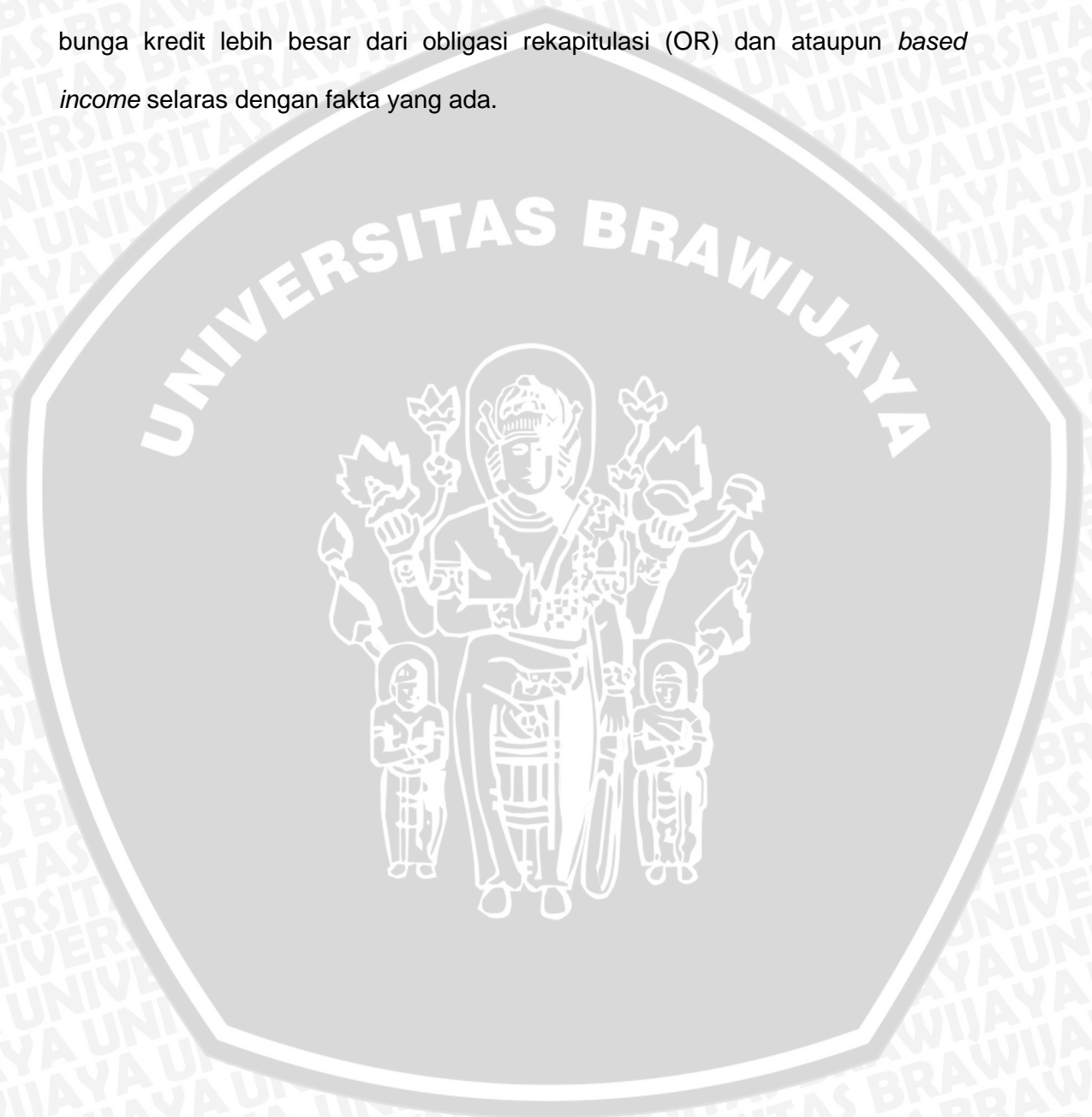
merupakan jawaban dari pekerja sebagai ungkapan terimakasih atas kenaikan gaji dan lipatan insentif.

Kunci sukses keempat adalah diterapkannya sistem informasi dan teknologi *on-line real time* di tingkat operasional. Dengan adanya teknologi ini, kemampuan dalam memobilisasi simpanan, ekspansi kredit, dan mengumpulnya *fee based income* semakin melejit. Berbagai produk canggih seperti reksadana (Brivestama), Bankassurance, dan DPLK jelas hanya dapat dilakukan dengan teknologi yang memadai. Selain itu, dengan IT yang akan menjadi *enabler factor* semakin membuka peluang BRI dalam melakukan bisnis berbasis IT.

Kunci sukses kelima adalah perubahan paradigma manajemen BRI yang awalnya cenderung tertutup dan birokratis, sekarang menjadi terbuka. Hal ini disebabkan selain karena komitmen manajemen puncak untuk lebih bersedia menerima masukan dari bawah juga karena adanya perubahan lingkungan seperti penggunaan internet maupun sms ydapat berfungsi mengurangi *communication gap* antara manajemen dengan pekerja. Lima kunci sukses tersebut tentu saja perlu untuk dipertahankan demi kestabilan kualitas BRI dari tahun ke tahun. Dengan tetap diimbangi dengan perbaikan-perbaikan baik diranah inovasi maupun yang lain diharapkan BRI bisa semakin eksis sebagai pelayan intermediasi terbaik bagi masyarakat khususnya “*wong cilik*”.

Selain terkenal dengan bank yang berpihak pada masyarakat semua kalangan khususnya “*wong cilik*”, BRI juga merupakan bank di Indonesia yang bergerak secara normal. Maksudnya, mayoritas pendapatan yang dimiliki berasal dari pendapatan bunga kredit dan bukan berasal dari *based income* dengan rincian 80% pendapatan berasal dari bunga kredit dan 20% pendapatan merupakan pendapatan lain-lain atau biasa disebut *based income*. Hal ini

menunjukkan bahwa kesimpulan yang ditulis oleh Djoko Retnadi (2006) dalam bukunya yang berjudul Memilih Bank yang Sehat dimana dalam buku tersebut beliau mengungkapkan bahwa hanya 20% bank-bank di Indonesia yang bergerak secara normal (salah satunya BRI) dengan porsi pendapatan dari bunga kredit lebih besar dari obligasi rekapitulasi (OR) dan ataupun *based income* selaras dengan fakta yang ada.



BAB V

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan di BRI Cabang Sutoyo Malang mengenai faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang didasarkan pada laporan kredit periode 2012-2013 dihasilkan kesimpulan yang secara garis besar sinkron dengan penelitian terdahulu yang digunakan. Walaupun ada beberapa variabel yang berbeda yang mempengaruhi dinamika kolektibilitas untuk kredit sektor pertanian akan tetapi pada dasarnya kesemua itu dapat dirangkum pada satu kesimpulan bahwa dinamika kolektibilitas termasuk yang terjerat kasus kredit bermasalah dipengaruhi oleh dua faktor resiko yaitu bisnis dan non bisnis. Omzet usaha, pinjaman, dan pinjaman lain, kesemuanya sudah terangkum dalam dua faktor resiko di atas.

Pada dasarnya, masalah bisnis hanya menjabarkan tentang segala bentuk kegagalan usaha yang disebabkan banyak hal, misalnya kelalaian pemilik usaha dalam berbisnis, kemampuan mengelola modal yang kurang tepat, faktor alam, siklus ekonomi yang berhubungan dengan harga jual dan biaya produksi, serta daya saing. Sedangkan faktor non bisnis juga hanya menjelaskan mengenai i'tikad tidak baik debitur dalam mempertanggungjawabkan kewajiban kreditnya, pinjman-pinjaman debitur, dan regulasi baik dari pihak bank maupun pemerintah.

Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan penyebab lain selain dua faktor di atas yaitu masalah kejelian ao program dan syarat-syarat kredit yang kurang *bankabel*. Syarat-syarat kredit yang mudah sebenarnya bertujuan untuk memudahkan nasabah dan meningkatkan ekspansi pasar bagi bank ternyata justru membawa kredit yang dikururkan memasuki nilai kolektibilitas KL, D, dan

M. Untungnya jumlah nominal kredit yang masuk dalam kategori kolek KL, D, dan M masih berada pada titik kewajaran dan tidak menyebabkan pengaruh buruk bagi bank. Sehingga kegiatan operasional bank tetap berjalan baik.

Secara umum di BRI Cabang Sutoyo Malang hampir tidak ada kredit bermasalah dikarenakan nilai NPLnya masih pada taraf yang wajar, yaitu kurang dari 5%, kecuali untuk satu NPL bulan Desember 2013 pada program KUR pertanian yaitu sebesar 24,69%. Adapun penjelasan mengenai dinamika kredit pertanian yang sempat masuk ranah kolek KL, D dan M adalah sebagai berikut:

a. KKPE

KKPE sempat memiliki angsuran yang masuk kolek KL, D, dan M. Hal ini terjadi sebagai akibat dari masalah bisnis dan non bisnis saja. Karena pada program ini, subsidi yang diberikan oleh pemerintah sangat besar. Sehingga walaupun masih terjadi dinamika kolek KL, D, dan M itu merupakan masalah yang memang tidak bisa dihindari 100% dikarenakan tidak mungkin bagi AO program untuk melihat pengeluaran detail per hari bagi seluruh kebutuhan nasabahnya. Seperti biaya hidup sehari-hari yang tidak semua orang akan mampu menjelaskannya dengan sangat detail. Sehingga ada indikasi percampuran penggunaan uang pribadi dari pendapatan usaha bisnis dengan modal pinjaman dari bank.

Masalah seperti ini bukan semata-mata murni kesalahan debitur karena debitur dalam hal ini juga sedang mengalami kegagalan usaha bisnisnya. Terlebih lagi dimana-mana petani selalu punya utang sehingga ketika usaha pertaniannya gagal akan berdampak pada *cashflow* untuk menutup semua kebutuhannya. Disisi lain peran AO sangat dibutuhkan sebagai pendamping dan *adviser* nasabahnya. Sehingga ketika terjadi kelalaian akan berdampak pada penggunaan modal yang kurang tepat,

siklus bisnis yang kurang tepat saat terjadi kegagalan, hingga akhirnya berdampak juga pada kemampuan untuk menunaikan kewajiban pada bank.

b. Ritel Pertanian

Untuk program ritel pertanian tidak ada masalah kolektibilitas karena memang dalam program ini syarat-syarat kreditnya selain *feasible* juga sangat *bankabel*. Selain itu karena kredit ritel pertanian ini merupakan kredit yang besar sehingga otomatis monitoring dari AO program juga lebih ketat dan lebih hati-hati.

c. KUR Pertanian

KUR yang diperuntukkan bagi sektor pertanian juga sempat memiliki angsuran yang masuk kolek KL, D, dan M. Akan tetapi penyebabnya bukan hanya faktor bisnis dan non bisnis melainkan ada pengaruh syarat-syarat kredit yang memang tidak dibuat *bankabel*. Sehingga ini menjadi tambahan indikasi kenapa KUR untuk sektor pertanian di BRI Cabang Sutoyo Malang sempat mengalami dinamika kolektibilitas kredit KL, D dan M.

Kemudian mengenai dampak kredit pertanian bagi pembangunan pertanian dalam naungan kredit BRI Cabang Sutoyo Malang memiliki kesimpulan akhir yaitu kucuran kredit pertanian tersebut ternyata belum mampu membangun pertanian secara optimal karena belum semua debitur yang mengajukan kredit benar-benar berhasil dalam ekspansi usaha walaupun tingkat pengembalian kreditnya baik. Hal ini terbukti dari kecenderungan masyarakat Malang yang kian menurun pada usaha pertanian dan memilih beralih ke usaha sekunder maupun tersier yang lebih menjanjikan. Mengingat bahwa Malang telah cukup sukses dalam pengembangan usaha jasanya.

Tingkat kesejahteraan debitur juga masih belum maksimal. Hanya pada petani skala ritel lah yang memang sudah memiliki tingkat kemapanan ekonomi yang baik yang memiliki kesejahteraan stabil. Untuk petani non ritel rata-rata

mereka dapat menikmati manfaat dari adanya kredit pertanian untuk mengembangkan usahanya melainkan belum masuk pada tataran kesejahteraan yang optimal. Hal ini terbukti dari peran sektor pertanian yang sumbangsinya terhadap PDRB Malang masih sangat kecil yaitu hanya 0,3%. Juga bukti bahwa peran penyumbang PDRB terbesar didominasi oleh sektor tersier seperti perdagangan, perhotelan, restoran dan sebagainya.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian maupun topik yang dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Usaha pertanian jangan sampai mati karena ketika usaha ini dapat dikelola dengan baik maka usaha pertanian juga bisa menjadi objek wisata agro yang masih sangat diminati masyarakat. Selain sebagai percontohan dalam mengelola pertanian, di tengah padatnya pembangunan gedung, wisata agro menjadi penyegar bagi masyarakat yang merindukan kesegaran alam dan hasil pertanian yang bisa dilihat dan dinikmati langsung.
- b. AO program yang memang dalam hal ini adalah orang yang memegang nasabah kredit, sebaiknya lebih teliti lagi dalam memonitoring. Dan sudah selayaknya dalam memonitoring, AO program ini tidak hanya fokus pada kewajiban nasabah akan pertanggungjawaban terhadap pinjaman yang dilakukan pada bank, melainkan juga peran untuk menjadi advicer dalam semua aspek usaha bisnis pertanian nasabahnya. AO program harus mampu menjadi teman yang baik bagi nasabahnya. AO program juga sudah selayaknya merupakan SDM yang cerdas dalam memberikan saran pengelolaan usaha pertanian, pengelolaan modal, uang kas hasil usaha, belanja-belanja modal, juga SDM tersebut harus lebih berkualitas, dan lebih bersahaja sehingga kehadirannya akan memberikan *support* bagi nasabah

yang dipegangnya. Sehingga dampak positif yang akan diterima adalah pengurangan kembali jumlah kredit yang bermasalah di BRI Cabang Sutoyo Malang.

- c. Mengenai syarat-syarat kredit, walaupun tujuannya untuk memudahkan akan tetapi prinsip kehati-hatian memang penting untuk diperhatikan. Ketika ada satu syarat yang sangat dimudahkan maka harus diimbangi dengan kenaikan pemantauan atau memberikan kebijakan khusus mengenai pengawasan yang lebih konsisten.
- d. Bagi pemerintah dan bank selaku pihak yang bekerjasama dalam program bantuan kredit bagi sektor pertanian, sebaiknya ada analisis lagi mengenai memorandum perjanjiannya supaya kedua belah pihak bisa lebih nyaman dalam menjalankan program. Karena pada program KUR, seperti yang sudah dibahas diatas masih terjadi beberapa ganjalan yang mampu menjadi beberapa penyebab bagi munculnya kredit bermasalah.

Penggalakan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sektor pertanian melalui beragam program bantuan modal memang tidak bisa dilepas tanpa diimbangi dengan dampingan edukasi pertanian berkelanjutan untuk semakin mencerdaskan masyarakat (petani) dalam mengelola usaha pertanian di masa sekarang. Melihat pertimbangan iklim dan fenomena alam yang banyak mengalami kerusakan dan gejolak ekonomi terhadap harga produk-produk pertanian, bahan baku, pupuk dan sebagainya yang seringkali naik turun dan berakhir dengan harga produk pertanian yang seringkali bernilai rendah dibandingkan dengan biaya produksinya, maka pencerdasan dalam pengolahan kembali (modernisasi pertanian) sangat perlu untuk digalakkan demi keberhasilan program yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Edisi 4 Mei 2012. *Kredit pertanian bank mandiri capai Rp 7,2 triliun*. <http://www.neraca.co.id>. Diakses pada hari Selasa, 20 Mei 2014.

Anonim. Edisi 16 Mei 2013. Infobanknews.com. *Raja Mikro Banking Belum Terkalahkan*. <http://www.infobanknews.com>. Diakses pada 12 Mei 2014.

Anonim. 2010. *Analisis Kinerja NPL Perbankan di Indonesia Serta Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Universitas Gunadarma.

Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. Bogor: *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 7 No. 1 Maret 2009, Hal 21-42.

Badan Pusat Statistik. 2013. *Hasil Sensus Pertanian 2013*. Malang: BPS.

Darmawanto. 2008. *Pengembangan Kredit Sektor Pertanian*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Darussalam, Olyvia. 2013. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di Pt. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Manado: *Jurnal EMBA* 69 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 69-77.

Goldberg, Mike dan Eric Palladini. 2011. *Pengelolaan Risiko dan Penciptaan Nilai Melalui Pendanaan Usaha Mikro*. Jakarta Selatan: PT Salemba Empat.

Hasan, Ismed Putro dan Anwari WMK. 2004. *Bank BRI Terbaik di Awal Milenium*. Jakarta Pusat: Masyarakat Profesional Madani.

Isanda, Virgitha Agustania. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Kasus Pada Pt Bank Bri Unit Cimanggis, Cabang Pasar Minggu)*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.

Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Semesta Asa Bersama. <http://thesis.binus.ac.id>. Diakses pada 25 Mei 2014.

Kementrian Pertanian. 2012. *Pedoman Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian*. Jakarta: Kementrian Pertanian.

BRI Cabang Sutoyo. *Laporan Kredit BRI Cabang Sutoyo Malang*. 2014. *Laporan Kredit tidak diterbitkan*. Malang: BRI Cabang Sutoyo.

Pasha, Ri'fat. 2009. Ekspansi Pembiayaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI Malang. Malang: *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol 13 No. 1, Januari 2009, Hal. 148-164.

Priyo, Bambang Jatmiko. 2013. *BRI Targetkan Kredit Pertanian Tumbuh 30 Persen* Edisi 23 September 2013. Jakarta: PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41.

Pusat pendidikan dan latihan BRI pusat Jakarta. 2014. Materi disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan seluruh wakil karyawan BRI di Indonesia. Jakarta: BRI Pusat.

Rahman, Arif Hakim dan Titi Isdarti. Edisi 12 september 2013. *Kur mendorong perkembangan umkm di minahasa utara*. Sekretariat kabinet republik indonesia: <http://www.setkab.go.id>. diakses pada 14 mei 2014.

Retnadi, Djoko. 2006. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rivai, Veitzhal, Permata Andria, Idroes N dlm Htn. Ferry. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rizqul, Akhmad Karim. 2006. *Evaluasi Pengembalian Kredit P4K Oleh Kelompok Petani Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.

Saunders, Anthony dan Marcia Millon Cornett. 2007. *Financial Institutions Management*. United States: Financial Institutions.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, Ade. 2008. *Aksesibilitas Petani Kecil Pada Sumber Kredit Pertanian Di Tingkat Desa: Studi Kasus Petani Padi Di Nusa Tenggara Barat*. Jawa Barat: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor.

Supriatna, Ade. 2009. *Aksesibilitas Petani Kecil pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa: Studi Kasus Petani Padi Di Nusa Tenggara Barat*. Jawa Barat: Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan teknologi Pertanian.

Sutojo, Siswanto. 1997. *Menangani kredit bermasalah: konsep, teknik, dan kasus*. Jakarta: PT Gramedia.

Taswan dlm Htn. 2006. *Manajemen Perbankan (konsep teknik & Aplikasi)* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tjiptoadinugroho. 1994. *Perbankan Masalah Perkreditan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Triwibowo, Dicky. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Nasabah Di Sektor Perdagangan Agribisnis (Kasus Pada BPR Rama Ganda Bogor)*. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Diperbanyak Oleh Divisi Kepatuhan dan Dukungan Hukum. <http://www.lps.go.id>. Diakses pada 24 Mei 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Jakarta: <http://hukum.unsrat.ac.id>. Diakses pada 24 Mei 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: <http://sesmen.kemenpera.go.id>. Diakses pada 24 Mei 2014.

PT Bank Rakyat Indonesia. 2012. *Informasi Pinjaman*: www.bri.co.id. Diakses pada 25 Mei 2014.

Lampiran

Draft dan Hasil Wawancara Dengan Informan BRI Cabang Sutoyo Malang

Yeni : Untuk kredit pertanian di BRI Sutoyo ada berapa macam mas?

Informan: 3 Mbak, ada KKPE, Ritel, dan KUR

Yeni : Itu masing-masing bedanya apa mas?

Informan : Kalau KKPE itu kredit ketahanan pangan dan energi biasanya dibagi tebu dan non tebu. Programnya pemerintah kalau KKPE itu. Ritel untuk pertanian tapi yang memang skalanya sudah besar, biasanya lebih dari 500 juta kreditnya. Kalau KUR itu programnya pemerintah juga. Bantuan untuk mengembangkkn usaha kecil, tidak hanya pertanian saja. Yang paling banyak sih memang UMKM kalau KUR.

Yeni : ooh, terus ketiganya pernah punya masalah gag mas? Pernah macet?

Informan: ya iya mba pasti.

Yeni : kayak gimana mas? Jelasin ya

Informan: Untuk KKPE, yang bikin macet itu usaha cabe. Karena waktu itu kena imbas abu gunung semeru. Selain itu ada tentang usaha perikanan yang sempat macet juga. Kalau KUR karena ini lebih pada usaha kecil menengah jadi butuh perhatian. Kalau Ritel pertanian, aman.

Yeni : Porsi kredit di sini paling besar di apa mas? Terus untuk pertanian itu berapa persennya mas dari seluruh plafond kredit yang diberikan?

Informan : Ritel, tapi untuk Ritel secara umum. Kalau pertanian nanti dilihat di datanya. Saya rekapkan dulu.

Yeni : Terus petani-petani yang pernah mengajukan kredit di sini, apakah mereka kemudian tetap sustainable untuk mengajukan lagi atau melanjutkan kreditnya mas?

Informan: iya mbak biasanya begitu.

Yeni : Kenapa Mas? Apakah karena pelayanan atau apa?

Informan: Iya mbak karena pelayanan iya, dan karena di BRI punya sistem rekening koran untuk kredit pertanian. Jadi petani merasa nyaman karena bisa membayar dengan bebas ketika mereka sudah memiliki uang. Yang penting bunga tetap dibayar per bulan. Tapi biasanya memang pokoknya dibayar pas jatuh tempo.

Yeni : Mas, jumlah petani yang tergabung di KUR dan Ritel berapa? Saya boleh minta data realisasi kredit untuk masing-masing program?

Informan: Iya mbak saya rekapkan dulu.

Yeni : Terus minta juga untuk nilai-nilai kredit macetnya boleh ya mas?

Informan: Iya bisa

*Setelah mendapatkan data laporan kredit pertanian dari bank

Yeni : Mas ini DPK yang besar terselesaikan tidak? Pun dengan KL dan Dnya?

Informan: iya kan itu pindah sudah nilainya

Yeni : Caranya bagaimana mas?

Informan: Ya ditarik'i terus ke nasabahnya

Yeni : Oya mas, ini gap NPL di tahun 2012 dan 2013 kok besar sekali? Apa yang mempengaruhi? Terus apa saja yang dilakukan hingga di tahun 2013 bisa menjadi baik lagi?

Informan : Iya mbak. Itu karena masalah bisnis. Tidak ada masalah sebenarnya jika berhubungan dengan kebijakan baik internal maupun eksternal bank. Untuk memperbaiki nilai NPL ya pokoknya ditagih'i terus mbak ke nasabahnya. Sering diingatkan.

Yeni : Jadi pengaruh kredit bermasalah ini bagi satuan program kredit bank bagaimana mas? Dan apakah berpengaruh juga untuk kegiatan operasional bank mas?

Informan : Ada pengaruhnya mba, karena kan uang bank itu kan uang masyarakat mbak. Jadi ya kalau bisa jangan sampai macet. supaya tidak mengganggu.

Yeni : Mas untuk BRI, apakah aktiva kredit menjadi sumber utama pendapatan? (untuk melihat apakah bank ini masuk kategori normal atau tidak. Karena berpengaruh pada proses justifikasi terkait nilai NPL).

Informan: iya mbak, jadi 80% dari kredit (bunga kredit), yang 20% dari free based income atau transaksi perbankan yang lain.

Yeni : Saat NPL tinggi, apakah profitabilitas yang diukur dari ROA menurun atau rendah?

Informan: tidak karena disini 80% kreditnya lebih besar dari transaksi yang lain.

Yeni : Perbandingan antara LDR dan NPL BRI berapa mas?

Informan: Saya gag hafal mbak. Langsung lihat didatanya saja.

Yeni : Di BRI, obligasi rekapitulasi (OR) lebih besar gag mas dari kreditnya? (untuk melihat apakah bank ini masuk kategori normal atau tidak. Karena berpengaruh pada proses justifikasi terkait nilai NPL)

Informan: Saya kurang tau mbak. Yang jelas untuk perbandingan pendapatan, yang terbesar dari kredit.

Yeni : Apakah BRI Sutoyo punya Brivestama, Bankassurance dan DPLK mas?

Informan : Iya Mbak ada kerjasama dengan lembaga asuransi, seperti yang diselenggarakan oleh BI, dan ada yang memang khusus menangani asuransi seperti Askrindo dan Jamkrindo.

Yeni : Mas, pembeda dari KKPE, KUR da Ritel berdasarkan fasilitas, syarat, dan jangka waktu apa mas?

Informan : kurang lebih seperti ini mbak, masing-masing punya ciri-cirinya. Seperti yang sempat disinggung sebelum-sebelumnya karena ada yang program pemerintah maka syarat-syaratnya juga disesuaikan dengan jenis programnya. Kalau jangka waktu karena ini pertanian rata-rata sama mbak. Syarat juga rata-rata sama kecuali KKPE karena itu memang benar-benar punya kekhususan.

	KKPE	KUR	Ritel
Ciri-ciri Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan melalui pembentukan kelompok tani dan ataupun kerjasama dengan koperasi. - Merupakan program pemerintah dengan bantuan subsidi. - Usaha tidak harus <i>bankabel</i>, <i>feasible</i> saja sudah cukup. - Membiayai bidang usaha tebu dan non tebu. - Agunan yang digunakan boleh tidak mengcover 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengajukan secara perorangan maupun kemitraan dengan usaha terkait. - Merupakan program pemerintah dengan bantuan subsidi. - Usaha tidak harus <i>bankabel</i>, <i>feasible</i> saja sudah cukup. - Membiayai semua bidang usaha. - Agunan yang digunakan boleh hanya mengcover 30% dari nilai kredit yang disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengajukan secara perorangan maupun kemitraan dengan usaha terkait. - Produk perbankan non subsidi pemerintah. - Usaha harus <i>feasible</i> dan <i>bankabel</i>. - Membiayai semua bidang usaha. - Agunan yang digunakan mengcover lebih dari 100% dari total kredit yang disepakati. - Membutuhkan tambahan agunan lain.
Jangka Waktu	Musiman.	Musiman dan ataupun 1 tahun.	Tahunan (1 tahun).

Yeni : Oya keterangan lebih lanjut terkait suku bunga dan subsidi tebu dan non tebu untuk KKPE bagaimana mas?

Informan: untuk KKPE Suku bunga 13% pertahun dengan subsidi: tebu disubsidi 5,5% oleh pemerintah. Non tebu disubsidi 7,5% dari pemerintah. Ketika terjadi tunggakan setelah jatuh tempo angsuran pokok berakhir, maka suku bunga kembali pada nominal 13% (tanpa subsidi). Pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan masa jatuh tempo kredit dan masa jatuh tempo bunganya.

Yeni : Selain KKPE, untuk program kredit yang lain, untuk mengajukan apakah pengajuannya juga berkelompok? Boleh perorangan tidak mas?

Informan: Kalau KUR dan Ritel bisa perorangan bisa lewat perusahaan seperti CV dan sebagainya atau lewat kemitraan juga bisa.

Yeni : Kemudian, sistem pembayaran bunga Ritel per tahun atau per bulan? Perorangan atau kelompok?

Informan: Suku bunga 13% per tahun. Pembayaran bunga rutin dilakukan per bulan. Perorangan atau kelompok tergantung model pengajuannya. Jadi konsisten dari awal.

Yeni : Jadi, detail suku bunga untuk KUR dan Ritel seperti apa mas?

Informan : Kalau KUR memiliki subsidi suku bunga dari pemerintah kurang dari 2% per bulan.

Suku bunga KUR mikro 1,02% per bulan (flat). Sedangkan KUR Ritel menggunakan suku bunga 13% per tahun (efektif). Pembayaran bunga rutin dilakukan per bulan. Kalau Ritel suku bunga 13% per tahun. Pembayaran bunga rutin dilakukan per bulan.

Yeni : Oya mas, kembali pada masalah kolektibilitas kredit pertanian, kemarin-kemarin ada yang masih kurang informasinya.

Informan: iya mbak. Yang mana?

Yeni : Tentang masalah dalam kredit pertanian, penyebabnya apa saja mas selain faktor alam? Apakah ada faktor dari debitur sendiri dalam hal kesalahan penggunaan uang?

Informan: Ya bisa jadi mbak.

Yeni : Cara taunya darimana mas?

Informan: Dari barang yang dimiliki mbak. Tiba-tiba ada sepeda motor baru atau yang lain. Tapi seringnya mereka sih menggunakan untuk pembelian aset usaha mbak.

Yeni : Mas, sebenarnya untuk semua debitur dalam kredit pertanian di BRI Sutoyo apakah punya pekerjaan atau usaha lain selain pertanian?

Informan: kalau pekerjaan lain ada.

Yeni : Dari semua jenis kolektibilitas tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap performance bank?

Informan: sejauh ini ya aman tapi kalau ada yang macet ya gimana, ya ada tapi tidak signifikan. Jadi aman.

Yeni : Mas, saya ingin tahu tentang PPAP. Di awal, dulu Mas Pras sempat menyebut tentang PPAP untuk program pertanian? Itu apa mas?

Informan: kalau untuk kredit pertanian, PPAP itu biaya yang dibayar debitur seperti ada dana yang disimpan untuk disisihkan sebagai cadangan atau jaminan misalnya terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Dan masing-masing kolektibilitas memiliki nilai PPAP yang berbeda-beda. Kolek lancar (L) nilai PPAPnya 1%. DPK nilai PPAPnya 5%. Kolektibilitas

kurang lancar (KL) nilai PPAPnya 20%. Kolektibilitas diragukan (D) nilai PPAPnya 50%.

Kredit macet (M) langsung dihitung berdasarkan besar agunan.

Yeni : Mas, saya mendengar mulai tahun 2014 ini KKPE di BRI lain mengalami masalah, apakah benar? Apakah di BRI Sutoyo juga mengalami masalah yang sama?

Informan: bisa jadi seperti itu mbak (akan tetapi pihak informan tidak menjelaskan masalahnya.

Peneliti mendapatkan informasi tentang masalah KKPE dari pegawai BRI lain).

Menurut informasi dari rapat BRI ditempat lain yang diselenggarakan pada bulan Mei awal kemarin, disampaikan bahwa mulai muncul keraguan dan ketakutan bagi AO program KKPE untuk terus berperan dalam melaksanakan program ini. KKPE yang merupakan program pemerintah untuk mengangkat dan mengembangkan sektor pertanian memiliki sistem pengawasan yang ketat. Mengingat sumber dana yang digunakan berasal dari APBN. Bahkan pemantau audit keuangan untuk KKPE langsung dari KPK. Sehingga ketika ada masalah dalam KKPE bank akan lebih khawatir jika berurusan dengan KPK. Hal ini menakutkan kinerja bank sebagai lembaga *profit oriented*. Saat ini isu terkini KKPE yang masih menjadi *privacy bank* adalah sebagai berikut:

- Terkait pembayaran bunga yang diatur tetap per bulan sedang penggunaan pinjamannya tidak selalu diambil per bulan.
- Dari sisi pencairan dananya.
- Masalah ancaman dobel pembiayaan.

Nb: Yeni

= Peneliti

Informan

= Pihak BRI yang bertanggungjawab sebagai AO Program